



# LAPORAN TAHUNAN BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NTT



# 2023

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan bimbingan-Nya kami dapat melaksanakan tugas pelayanan dengan baik dan dapat menyelesaikan Laporan Tahunan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.

Sebagai bentuk upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta tertib pelaksanaan fungsi Pemerintah Daerah, maka Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara menyusun Laporan Tahunan 2023, yang disusun sebagai bahan pertanggungjawaban sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada periode Tahun Anggaran 2023. Kiranya laporan ini sebagai bahan perencanaan untuk memacu percepatan pelaksanaan kegiatan-kegiatan selanjutnya.

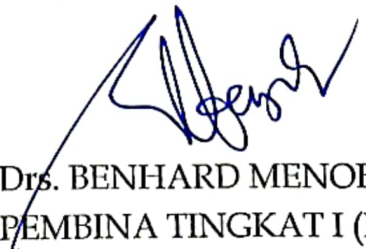
Menyadari akan keterbatasan yang dimiliki, maka kami mengharapkan kepada semua pihak, berkenan memberikan masukan, berupa saran dan petunjuk dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dimasa mendatang.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023.

Kupang, Januari 2024

Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

9



Drs. BENHARD MENO, MT  
PEMBINA TINGKAT I (IV/B)  
NIP. 19720512 199101 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR GAMBAR..... iii

DAFTAR TABEL .....iv

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

    A. Latar Belakang..... 1

    B. Landasan Hukum ..... 1

    C. Maksud dan Tujuan ..... 3

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN ..... 4

    A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah ..... 4

    B. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah ..... 5

    C. Gambaran susunan organisasi Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :..... 7

    D. Sumber Daya Manusia Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ..... 12

    E. Sarana dan Prasarana (Aset)..... 13

BAB III REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2023..... 16

    A. Alokasi Program Dan Kegiatan ..... 16

    B. Realisasi Pendapatan Dan Belanja Pada Badan Keuangan Daerah ..... 17

    C. Realisasi Program Dan Kegiatan Pada Badan Keuangan Daerah..... 20

    D. Penjabaran Realisasi Dan Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Dan Kegiatan ..... 20

    E. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian penetapan kinerja..... 26

    F. Permasalahan Dan Solusi..... 103

BAB IV PENUTUP ..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR..... 6



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Tenaga Kontrak berdasarkan Tingkat Pendidikan ..... 12

Tabel 2.2 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan ..... 12

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Staf..... 13

Tabel 2.4 Daftar Barang Inventaris Badan Keuangan Daerah..... 13

Tabel 2.5 Daftar Pengadaan Barang Badan Keuangan Daerah ..... 15

Tabel 3.1 Realisasi Keuangan Program Tahun 2023 ..... 20

Tabel 3.2 Penjabaran Realisasi Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 ..... 20

Tabel. 3.3 Hasil Pelaksanaan Bidang Anggaran per 31 Desember 2023..... 33

Tabel 3.4 kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023 ..... 35

Tabel. 3.5 Hasil Pelaksanaan Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota Badan Keuangan Daerah per 31 Desember 2023 ..... 46

Tabel. 3.6 Hasil Pelaksanaan Bidang Pengelolaan Perbendaharaan Daerah per 31 Desember 2023 ..... 93

Tabel. 3.7 Hasil Pelaksanaan Bidang Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Per 31 Desember 2023 ..... 102

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah merupakan program yang harus dicapai dan dilaksanakan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama kurun waktu 5 tahun dalam mendukung visi dan misi Gubernur dan Waakil Gubernur Nusa Tenggara Timur “NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai NKRI”.

Dalam upaya mendukung Visi dan Misi tersebut maka Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah merumuskan berbagai kegiatan yang dapat menunjang program pengelolaan keuangan daerah melalui indikator sasaran yang secara langsung dapat menunjukkan kinerja sebagai komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program dan berbagai kegiatan, maka perlu disusun suatu laporan yang menggambarkan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan tersebut selama Tahun Anggaran 2023 pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### **B. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Laporan Tahunan ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## LAPORAN TAHUNAN 2023

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
13. ( Pergub Penjabaran APBD 2022 dan Perubahanya )
14. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penatausahaan, Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaian serta Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2017.
15. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.

### C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan tahunan ini adalah untuk memberikan informasi tentang capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan rencana kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sedangkan tujuannya adalah *pertama* sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, *kedua* sebagai bahan kajian serta masukan untuk percepatan kegiatan dan *ketiga* sebagai sarana evaluasi untuk memberikan umpan balik kepada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka meningkatkan kinerja selama tahun anggaran berjalan dan dimasa yang akan datang.



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PELAYANAN**

#### **A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Keuangan Daerah mempunyai Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Badan Keuangan Daerah merupakan unsur teknis Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum.
2. Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan pemerintahan daerah di bidang keuangan.
3. Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan Daerah.
  - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan Daerah.
  - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan Daerah.
  - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan Daerah.
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Kewenangan Badan Keuangan Daerah adalah :
  - a. Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
  - b. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
  - c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
  - d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
  - e. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank/ dan atau lembaga lain yang telah ditunjuk.
  - f. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi.

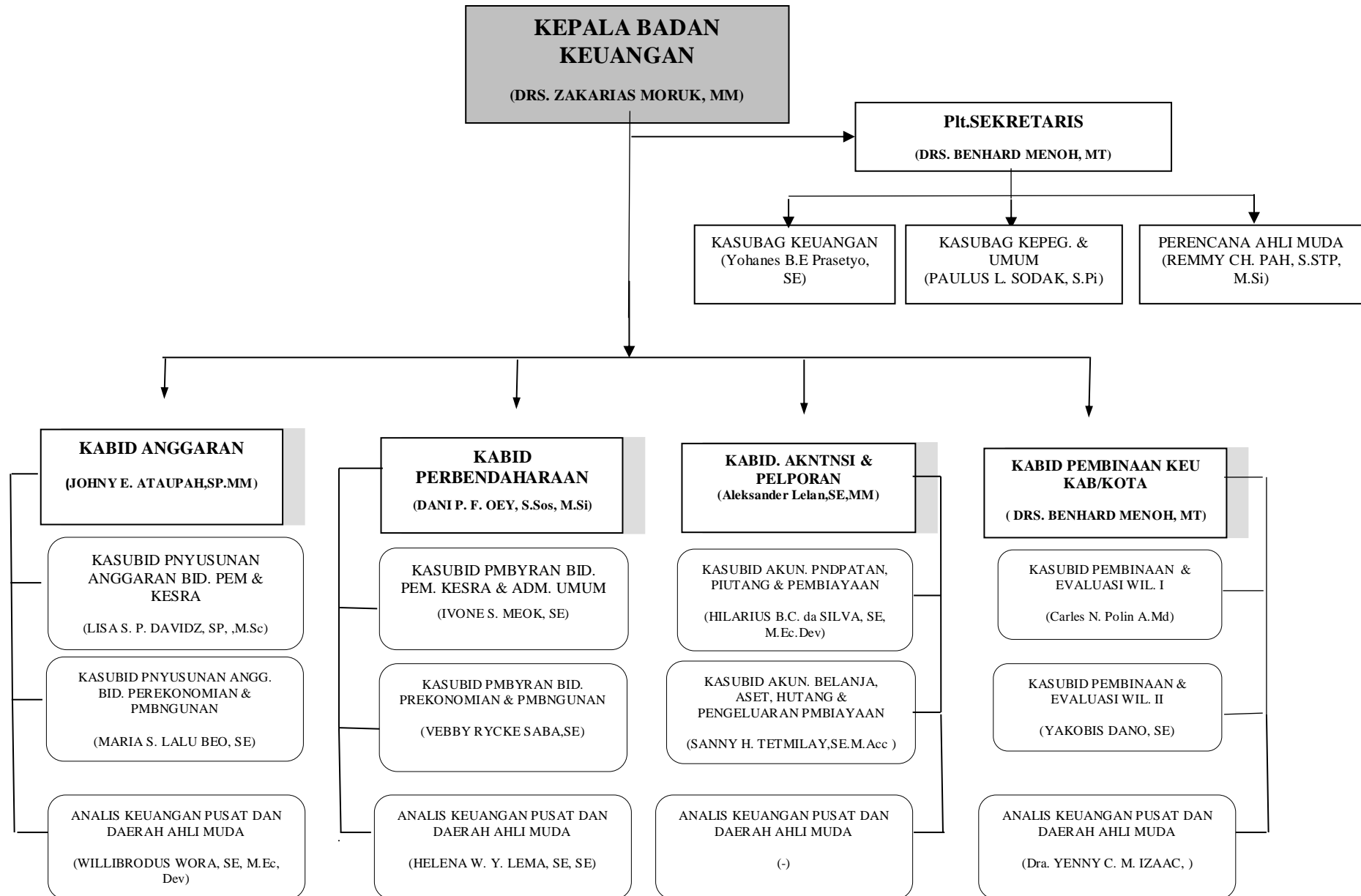
- g. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.
- h. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah.
- i. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah.
- j. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.
- k. Melakukan penagihan piutang daerah.
- l. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
- m. Menyiapkan informasi keuangan daerah.

**B. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah**

Struktur Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

- a. Badan Keuangan Daerah terdiri atas 1 Sekretariat dan 3 Sub Bagian, 4 Bidang dan 12 Sub Bidang.
- b. Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah terdiri atas :
  - 1) Kepala .
  - 2) Sekretariat.
  - 3) Bidang.
  - 4) Sub Bagian.
  - 5) Sub Bidang.
- c. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, sedangkan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepala Badan.

**Gambar 2.1 STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



**C. Gambaran susunan organisasi Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :**

Susunan organisasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari:

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, terdiri atas :
  - 1) Sub Bagian Keuangan.
  - 2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Anggaran, terdiri atas :
  - 1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan.
  - 2) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
- d. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas :
  - 1) Sub Bidang Pembayaran Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum.
  - 2) Sub Bidang Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas :
  - 1) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan.
  - 2) Sub Bidang Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan.
- f. Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten /Kota, terdiri atas :
  - 1) Sub Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I.
  - 2) Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah II.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Dalam menjalankan roda organisasi Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT mempunyai rumusan tugas sebagai berikut:

a. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai rumusan tugas yaitu merumuskan program kerja Badan Keuangan Daerah meliputi kesekretariatan, anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, pembinaan keuangan kabupaten/kota baik sebagai SKPD maupun SKPKD selaku PPKD berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk menunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai rumusan tugas yaitu merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan program, data dan evaluasi, keuangan, kepegawaian dan umum serta membantu Kepala Badan mengkoordinasikan bidang-bidang berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar.

Sekretaris membawahi 2 (dua) Kepala Sub Bagian yaitu:

- 1) Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai rumusan tugas yaitu merencanakan dan melaksanakan kegiatan urusan keuangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
- 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai rumusan tugas yaitu merencanakan dan melaksanakan kegiatan kepegawaian dan umum melalui penyiapan bahan urusan kepegawaian, ketatausahaan, asset serta urusan rumah tangga dan perjalanan dinas berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tercipta penataan personalia yang kompeten sesuai perkembangan demi terwujudnya pengelolaan administrasi yang tepat dan akurat.

c. Kepala Bidang Anggaran

Kepala Bidang Anggaran mempunyai rumusan tugas yaitu merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan meliputi perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah baik SKPD maupun SKPKD meliputi bidang pemerintahan, bidang perekonomian dan pembangunan serta bidang administrasi umum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedianya anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berbasis kinerja.

Kepala Bidang Anggaran membawahi 2 (dua) Kepala Sub Bidang yaitu:

- 1) Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan, mempunyai rumusan tugas yaitu merencanakan dan melaksanakan kegiatan penyusunan anggaran bidang pemerintahan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedianya anggaran berbasis kinerja.
- 2) Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan, mempunyai rumusan tugas yaitu merencanakan dan melaksanakan kegiatan penyusunan anggaran bidang perekonomian dan pembangunan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedianya anggaran berbasis kinerja.

d. Kepala Bidang Perbendaharaan

Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai rumusan tugas yaitu merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perbendaharaan meliputi pembayaran bidang pemerintahan dan administrasi umum, pembayaran bidang perekonomian dan pembangunan serta pengelolaan kas dan pembinaan bendahara berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedia dana bagi pembiayaan program dan kegiatan.

Kepala Bidang Perbendaharaan membawahi 2 (dua) Kepala Sub Bidang yaitu:



- 1) Kepala Sub Bidang Pembayaran Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Administrasi Umum, mempunyai rumusan tugas yaitu merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembayaran bidang pemerintahan dan administrasi umum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedia dana pembiayaan program dan kegiatan bidang pemerintahan dan administrasi umum.
- 2) Kepala Sub Bidang Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan, mempunyai rumusan tugas yaitu merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembayaran bidang perekonomian dan pembangunan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedia dana pembiayaan program dan kegiatan bidang perekonomian dan pembangunan.

e. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai rumusan tugas yaitu merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan meliputi penatausahaan dan akuntansi pendapatan SKPD dan SKPKD, penatausahaan dan akuntansi belanja SKPD dan SKPKD, asset, hutang dan pengeluaran pembiayaan serta akuntansi penyusunan laporan keuangan baik entitas akuntansi maupun entitas pelaporan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahi 2 (dua) Kepala Sub Bidang yaitu:

- 1) Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan, mempunyai rumusan tugas yaitu merencanakan dan melaksanakan kegiatan penatausahaan dan akuntansi pendapatan, piutang dan penerimaan pembiayaan baik entitas akuntansi maupun entitas pelaporan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tertib administrasi keuangan daerah.

- 2) Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan, mempunyai rumusan tugas yaitu merencanakan dan

melaksanakan kegiatan penatausahaan dan akuntansi belanja, piutang dan penerimaan pembiayaan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tertib administrasi keuangan daerah.

f. Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota

Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota mempunyai rumusan tugas yaitu merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan keuangan kabupaten/kota meliputi pembinaan dan evaluasi wilayah I, pembinaan dan evaluasi wilayah II serta pembinaan dan evaluasi wilayah II berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tercapai keserasian kebijakan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota membawahi 2 (dua) Kepala Sub Bidang yaitu:

- 1) Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I, mempunyai rumusan tugas yaitu merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan dan evaluasi wilayah I meliputi wilayah Flores berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tercapai keserasian pengelolaan keuangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 2) Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah II, mempunyai rumusan tugas yaitu merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan dan evaluasi wilayah II meliputi wilayah Sumba, Lembata, Alor dan Sabu Raijua berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tercapai keserasian pengelolaan keuangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

D. Sumber Daya Manusia Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Program dan kegiatan yang telah direncanakan akan tercapai apabila didukung dengan sumber daya yang memadai baik anggaran maupun sumber daya manusia. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai kondisi per 31 Desember 2023 didukung oleh PNS yang berjumlah 67 orang dan Non PNS yang berjumlah 71 orang. Berikut ini sekilas gambaran terkait dengan komposisi PNS yang ada pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur :

Tabel 2.1  
Jumlah Tenaga Kontrak berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Kelamin			Jumlah
	Pendidikan	Pria	Wanita	
1	Sekolah dasar (SD)	1	-	1
2	SMP	-	-	
3	SMA/SMK	8	5	13
4	Diploma 3	4	1	5
5	D4/SI	25	25	50
6	S2	2	-	2
Jumlah		40	31	71

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Tabel 2.2  
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Pria	Wanita	Jumlah
1.	Strata 3 (S-3	-	-	-
2.	Strata 2 (S-2)	10	8	18
3.	Strata 1 (S-1)	12	26	38
4.	Diploma 3	3	3	6
5.	SLTA/SMK/KPAA	4	1	5
6.	SLTP	-	-	-
Jumlah		29	38	67

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Staf**

No.	Jabatan	Pria	Wanita	Jumlah
1.	Eselon II	1	-	1
2.	Eselon III	4	-	4
3.	Eselon IV	5	5	10
4.	Fungsional	2	2	4
5.	Staf	17	31	48
Jumlah		29	38	67

*Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum*

**E. Sarana dan Prasarana (Aset)**

Berikut Daftar Nilai Aset pada Badan Keuangan Daerah :

**Tabel 2.4**  
**Daftar Barang Inventaris Badan Keuangan Daerah**

1	Barang Tidak Bergerak, terdiri dari :			
	a.	Tanah Sebanyak	-	Bidang
	b.	Gedung Sebanyak	-	Unit
2	Barang Bergerak, terdiri dari :			
	c.	Kendaraan Roda 6	-	Unit
	d.	Kendaraan Roda 4	6	Unit
	e.	Kendaraan Roda 2	-	Unit
3	Barang Inventaris Kantor Lainnya terdiri dari :			
	f.	Kursi	151	Unit
	g.	Meja	162	Unit
	h.	Lemari	31	Unit
	i.	Rak Besi	13	Unit
	j	Sofa	5	Unit
	k.	Lori Dorong	4	Unit
	l.	File Box/Kotak Surat	1	Unit
	m.	Filing Cabinet Besi	2	Unit
	n.	Mobile File	2	Unit
	o.	External/ Portable Hardisk	4	Unit
	p.	P.C Unit	117	Unit
	q.	Lap Top	47	Unit
	r.	Mini Komputer	1	Unit
	s.	Note Book	15	Unit
	t.	Server	6	Unit

LAPORAN TAHUNAN 2023

	u.	Mainframe (Komputer Jaringan)	3	Unit
	v.	Peralatan Mainframe Lainnya	1	Unit
	w.	Peralatan Jaringan Lain-lain (Lan Tester)	1	Unit
	x.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	71	Unit
	y.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	96	Unit
	z.	Mesin Fotocopy Folio	1	Unit
	aa.	Megaphone	2	Unit
	ab.	Microphone Floor Stand	1	Unit
	ac.	Voice Recorder	11	Unit
	ad.	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	Unit
	ae.	Mesin Absensi	7	Unit
	af.	Brandkas	2	Unit
	ag.	Genset	1	Unit
	ah.	Tripod Camera	4	Unit
	ai.	Camera Digital	1	Unit
	aj.	Facsimile	2	Unit
	ak.	Sound System	5	Unit
	al.	Televisi	7	Unit
	am.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	5	Unit
	an.	Webcam/Camera Web	4	Unit
	ao.	LCD Projector/Infocus	4	Unit
	ap.	Wireless	1	Unit
	aq.	Acces Point	4	Unit
	ar.	CAT 6 Cable	4	Unit
	as.	Router	4	Unit
	at.	Switch	1	Unit
	au.	Mikrobits	1	Unit
	av.	Hub	8	Unit
	aw.	Kabel UTP	1	Unit
	ax.	Main Router	1	Unit
	ay.	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	9	Unit
	az.	Interior	3	Unit
04.00	Aset tetap lainnya :			
	a.	Buku	5	buah

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Tabel 2.5  
Daftar Pengadaan Barang Badan Keuangan Daerah

N O	NAMA BARANG/JENIS BARANG	SPK/PERJANJIAN/KONTRAK/ PESANAN		DPPA/SPM/ KWITANSI/BKU		JUMLAH			LOKASI	DIPERGUNAKAN	MERK/TYPE	WARNA	KET.
		TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	NOMOR	JMLH BARANG	HARGA (11%)	JUMLAH					
1	KOMPUTER-PC ALL IN ONE	31 Maret 2023	08/PP- Mbiz/Modal/ III/2023	Selasa, 04 April 2023	00867/5.02.0.00 .0.00.02/BPK/UP /B07/2023	3	13.679.640	41.038.920	KUPANG	BKEUDA	Acer	Hitam	Baik
2	PRINTER	31 Maret 2023	08/PP- Mbiz/Modal/ III/2023	Selasa, 04 April 2023	00868/5.02.0.00 .0.00.02/BPK/UP /B07/2023	2	5.129.310	10.258.620	KUPANG	BKEUDA	EPSON L4260	Hitam	Baik
3	PRINTER	31 Maret 2023	08/PP- Mbiz/Modal/ III/2023	Selasa, 04 April 2023	00868/5.02.0.00 .0.00.02/BPK/UP /B07/2023	1	2.507.490	2.507.490	KUPANG	BKEUDA	EPSON L121	Hitam	Baik
4	LAPTOP	03 April 2023	027/768/BK UD1.3/2023	Selasa, 04 April 2023	00866/5.02.0.00 .0.00.02/BPK/UP /B07/2023	4	15.389.040	61.556.160	KUPANG	BKEUDA	ACER	Abu-abu	Baik
	Jumlah :					10		115.361.190					

Sumber data : Sub Kegiatan Kepegawaian & Umum



### **BAB III**

## **REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2023**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada tahun anggaran 2023, maka Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan program dan kegiatan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.

#### **A. ALOKASI PROGRAM DAN KEGIATAN**

Alokasi program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 meliputi 3 PROGRAM dan 14 KEGIATAN dengan uraian belanja sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Terdiri dari 8 KEGIATAN dan 22 SUB KEGIATAN, meliputi:
  - a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja (4 Sub Kegiatan)
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (5 Sub Kegiatan).
  - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1 Sub Kegiatan).
  - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1 Sub Kegiatan)
  - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah (5 Sub Kegiatan)
  - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1 Sub Kegiatan)
  - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (3 Sub Kegiatan)
  - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2 Sub Kegiatan)
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah  
Terdiri dari 5 KEGIATAN dan 25 SUB KEGIATAN, meliputi:
  - a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah (7 Sub Kegiatan)
  - b. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota (5 Sub Kegiatan)

- c. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah (5 Sub Kegiatan)
- d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah (3 Sub Kegiatan)
- e. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (4 Sub Kegiatan)
- 3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah  
Terdiri dari 1 KEGIATAN dan 1 SUB KEGIATAN
  - a. Pengelolaan Barang Milik Daerah (1 Sub Kegiatan)

## **B. REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA PADA BADAN KEUANGAN DAERAH**

Realisasi Pendapatan dan Belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

### **1. Realisasi Pendapatan**

Pada Tahun Anggaran 2023 Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah adalah pendapatan yang merupakan dana transfer dari Pusat sebesar Rp. 4.916.185.685.870.00,-. Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 4.609.172.022.143.66,- atau 93,76 %.

### **2. Realisasi Belanja**

Belanja yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Alokasi anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Keuangan Daerah adalah Rp. 760.988.379.960,- Realisasi Rp. 686.443.024.778 atau 90,20 % dengan rincian sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.014.276.952,- realisasi sebesar Rp. 13.312.945.336,- atau 95,00 % melalui kegiatan :
  - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 217.435.900,- realisasi sebesar Rp. 206.511.700,- atau 94,98%.
  - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 8.354.756.600,- realisasi sebesar Rp. 7.729.393.983,- atau 92,51%.

- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 5.000.000,- realisasi sebesar Rp. 4.863.000,- atau 97,26%.
  - 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 93.473.000,- realisasi sebesar Rp. 93.391.100,- atau 99,91%.
  - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 1.083.016.192,- realisasi sebesar Rp. 1.063.444.534,- atau 98,19%.
  - 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran Rp. 120.764.400,- realisasi sebesar Rp. 120.222.811,- atau 99,55%.
  - 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran Rp. 3.831.375.860,- realisasi sebesar Rp. 3.786.867.560,- atau 98,84%.
  - 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran Rp. 308.455.000,- realisasi sebesar Rp. 308.250.648,- atau 99,93%.
- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 745.535.766.688,- realisasi sebesar Rp. 671.764.381.067 atau 90,10%, melalui kegiatan:
- 1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan pagu anggaran Rp. 9.200.234.333,- realisasi sebesar Rp. 8.744.406.705,- atau 95,05%.
  - 2) Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 2.383.524.700,- realisasi sebesar Rp. 2.340.693.226,- atau 98,20%.
  - 3) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dengan pagu anggaran Rp. 1.907.327.688,- realisasi sebesar Rp. 1.882.523.498,- atau 98,70%.
  - 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan pagu anggaran Rp. 2.652.178.702,- realisasi sebesar Rp. 2.581.978.397,- atau 97,35%.

- 5) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pagu anggaran Rp. 729.392.501.265,- realisasi sebesar Rp. 656.214.779.242,- atau 89,97%.
  - c. Program pengelolaan barang milik daerah memiliki 1 kegiatan yakni pengelolaan barang milik daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.438.336.320,- realisasi sebesar Rp. 1.365.698.375,- atau 94,95%.
3. Pembiayaan
- Penerimaan pembiayaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, terdiri dari :
    - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp.83.034.698.805.00,- Realisasinya Rp.83.034.698.805.15,- (100.00%).
    - Pencairan dana cadangan Rp.170.807.913.600.00 dan Realisasinya Rp. 136.488.800.000.00,- (79,91%).
    - Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah Rp.4.159.731.999.00,- dan Realisasinya Rp.2.610.800.573.00,- (62,76%).
  - Pengeluaran Pembiayaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp.322.953.545.889,90,- yang terdiri dari :
    - Pembentukan dana cadangan telah sebesar Rp.240.000.000.000.00,- dan Realisasinya Rp.240.000.000.000.00,- (100.00%)
    - Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp. 38.402.563.453.00,- dan Realisasinya Rp.24.779.266.206.00,-(64,53).

C. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH

Realisasi program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.1  
Realisasi Keuangan Program Tahun 2023

N O.	JENIS BELANJA/ PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI DANA (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	PROSENT ASI CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.014.276.952	13.312.945.336	95,00%
B.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	745.535.766.688	671.764.381.067	90,10%
C.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.438.336.320	1.365.698.375	94,95%

D. PENJABARAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Realisasi dan capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Penjabaran Realisasi Keuangan pada Badan Keuangan Daerah  
Tahun Anggaran 2023

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
5	2					KEUANGAN	760.988.379.96	686.443.024.778	90,20%
						Badan Keuangan Daerah	760.988.379.96	686.443.024.778	90,20%

LAPORAN TAHUNAN 2023

5	2	1				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>14.014.276.952</b>	<b>13.312.945.336</b>	<b>95,00%</b>
5	2	1	1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	217.435.900	206.511.700	94,98%
5	2	1	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	29.832.400	99,44%
5	2	1	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	60.351.800	60.292.000	99,90%
5	2	1	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	78.455.000	77.833.700	99,21%
5	2	1	1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.629.100	38.553.600	79,28%
5	2	1	1	2		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8.354.756.600</b>	<b>7.729.393.983</b>	<b>92,51%</b>
5	2	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.178.762.000	5.569.375.183	90,14%
5	2	1	1	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.996.831.600	1.986.393.000	99,48%
5	2	1	1	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	119.163.000	113.649.000	95,37%
5	2	1	1	2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	30.000.000	29.992.300	99,97%
5	2	1	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.000.000	29.984.500	99,95%
5	2	1	1	3		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.863.000</b>	<b>97,26%</b>
5	2	1	1	3	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	4.863.000	97,26%
5	2	1	1	5		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>93.473.000</b>	<b>93.391.100</b>	<b>99,91%</b>
5	2	1	1	5	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	93.473.000	93.391.100	99,91%



LAPORAN TAHUNAN 2023

5	2	1	1	6		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.083.016.192</b>	<b>1.063.444.534</b>	<b>98,19%</b>
5	2	1	1	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	180.085.880	180.080.400	100,00%
5	2	1	1	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	70.450.200	57.980.000	82,30%
5	2	1	1	6	7	Penyediaan Bahan/Material	192.606.600	192.389.647	99,89%
5	2	1	1	6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	274.873.512	274.434.512	99,84%
5	2	1	1	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	365.000.000	358.559.975	98,24%
5	2	1	1	7		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>120.764.400</b>	<b>120.222.811</b>	<b>99,55%</b>
5	2	1	1	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.764.400	120.222.811	99,55%
5	2	1	1	8	8	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.831.375.860</b>	<b>3.786.867.560</b>	<b>98,84%</b>
5	2	1	1	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.565.400	17.580.600	48,08%
5	2	1	1	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	750.000.000	750.000.000	100,00%
5	2	1	1	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Melebihi Pagu Validasi	3.044.810.460	3.019.286.960	99,16%
	2	1	1	9		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>308.455.000</b>	<b>308.250.648</b>	<b>99,93%</b>
5	2	1	1	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	261.820.000	261.775.648	99,98%
0	1	0	9	0	9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.635.000	46.475.000	99,66%
5	2	2	1			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>745.535.766.688</b>	<b>671.764.381.067</b>	<b>90,10%</b>
5	2	2	1	1		<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>9.200.234.333</b>	<b>8.744.406.704</b>	<b>95,05%</b>

LAPORAN TAHUNAN 2023

5	2	2	1	1	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	329.661.100	324.895.281	98,55%
5	2	2	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	449.915.500	447.061.444	99,37%
5	2	2	1	1	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	221.362.800	221.293.060	99,97%
5	2	2	1	1	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	168.051.100	159.984.600	95,20%
5	2	2	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3.527.033.500	3.211.739.345	91,06%
5	2	2	1	1	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2.916.490.800	2.896.585.170	99,32%
5	2	2	1	1	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1.587.719.533	1.482.847.804	93,39%
5	2	2	1	2		<b>Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.383.524.700</b>	<b>2.340.693.226</b>	<b>98,20%</b>
5	2	2	1	2	2	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	548.501.900	538.108.418	98,11%
5	2	2	1	2	3	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	486.866.900	486.547.270	99,93%

LAPORAN TAHUNAN 2023

5	2	2	1	2	4	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	489.866.400	486.110.280	99,23%
5	2	2	1	2	5	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	754.797.000	736.612.616	97,59%
5	2	2	1	2	7	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	78.492.500	69.547.642	88,60%
5	2	2	1	2	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Deareh	25.000.000	23.767.000	95,07%
5	2	2	1	3		<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>1.907.327.688</b>	<b>1.882.523.498</b>	<b>98,70%</b>
5	2	2	1	3	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	455.918.500	454.350.100	99,66%
5	2	2	1	3	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	243.660.100	243.275.280	99,84%
5	2	2	1	3	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	384.874.696	375.200.600	97,49%
5	2	2	1	3	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan	226.999.696	219.658.873	96,77%

LAPORAN TAHUNAN 2023

						Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			
5	2	2	1	3	8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	595.874.696	590.038.645	99,02%
5	2	2	1	4		<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>2.652.178.702</b>	<b>2.581.978.397</b>	<b>97,35%</b>
0	2	1	0	4	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan kas dan Pengeluaran Kas Daerah	95.680.000	95.676.000	100,00%
5	2	2	1	4	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	484.776.602	467.960.920	96,53%
5	2	2	1	4	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2.071.722.100	2.018.341.477	97,42%
5	2	2	1	5		<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>729.392.501.265</b>	<b>656.214.779.242</b>	<b>89,97%</b>
5	2	2	1	5	4	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	63.374.211.388	1.814.623.048	2,86%
5	2	2	1	5	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	5.424.756.000	-	-

5	2	2	1	5	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	11.055.939.527	882.798.125	7,98%
5	2	2	1	5	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	649.537.594.350	653.517.358.069	100,61%
5	2	3				<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>1.438.336.320</b>	<b>1.365.698.375</b>	94,95%
5	2	3	1	1		Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.438.336.320	1.365.698.375	94,95%
5	2	3	1	1	1	Penyusunan Standar Harga	1.438.336.320	1.365.698.375	94,95%

Sumber : SPJ Belanja – Fungsional Desember 2023

**E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian penetapan kinerja.**

Keberhasilan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pencapaian penetapan kinerja dalam perjanjian kinerja didukung oleh Program dan Kegiatan sebagai berikut :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Selama 1 (satu) Tahun, hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT yang menjadi tanggungjawab teknis dari Sekretariat berdasarkan DPA Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT TA. 2023 terdiri dari 14 kegiatan dan 47 sub kegiatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

**a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Sub Bagian PDE bertanggungjawab untuk menangani kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Pagu sebesar Rp.217.435.900,- Realisasi sebesar Rp. 206.511.700,- (94,98%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan, :

- ⇒ Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
- ⇒ Tersusunnya LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- ⇒ Tersusunnya SK Pembentukan Pembantu Pejabat Pengelola Keuangan dan Dokumentasi pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.
- ⇒ Tersusunnya SK Pejabat Pengelola Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.
- ⇒ Tersusunnya SK Administrator Elektronik Kinerja (E-Kinerja/E-Monev Performance) pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.
- ⇒ Tersusunnya SK Administrator Elektronik Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (E-MEP) pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.
- ⇒ Tersusunnya Laporan Bulanan, Evaluasi Triwulan dan Laporan Tahunan.
- ⇒ Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
- ⇒ Tersusunnya RKA murni dan perubahan Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023
- ⇒ Tersusunnya RAK Murni dan Perubahan Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 yang di input pada aplikasi SIPD (penatausahaan).
- ⇒ Tersusunnya Renja Perubahan Tahun Anggaran 2023, Renja Tahu Anggaran 2023, RestraPerubhaan 2018-2023, Rencana



Aksi Tahun Anggaran 2023, Rencana Kinerja Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023.

- ⇒ Tersusunnya Peta Proses Bisnis dan GAP-GBS Badan Keuangan daerah.
- ⇒ Tersusunnya Laporan Bulalanan
- ⇒ Tersusunnya Laporan Triwulan dan Notulen Triwulan
- ⇒ Tersusunnya Laporan Semester
- ⇒ Tersusunnya Laporan Tahunan dan Rencana Aksi

**b. Sub Kegiatan Administrasi Keuangan**

Sub Bagian Keuangan bertanggungjawab menangani kegiatan Administrasi Keuangan Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD, dan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran. Pagu sebesar Rp. 8.354.756.600,- Realisasi Rp. 7.729.393.983 (92,51%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan:

- ⇒ Tersusunnya Laporan Realisasi Keuangan
- ⇒ Tersusunnya SK Penunjukkan/ penetapan Petugas Verifikasi SPJ pada kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.
- ⇒ Terjawabnya temuan Inspektur Jenderal
- ⇒ Tersusunnya SK Penunjukkan/ penetapan Pejabat Pengelola Keuangan kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.

- ⇒ Tersusunnya SK Penunjukkan/penetapan Petugas Penyiapan SPP dan SPM kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.
- ⇒ Tersusunnya SK Penunjukkan/penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.
- ⇒ Tersusunnya SK Penunjukkan/penetapan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.

**c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah**

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, yang terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD. Pagu sebesar Rp. 5.000.000,- Realisasi Rp. 4.863.000,- (97,26%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

- ⇒ Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah.
- ⇒ Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.

**d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Pagu sebesar Rp. 93.473.000,-

Realisasi Rp. 93.391.100,- (99.91%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

- ⇒ Tersusunnya Laporan Budaya Kerja.
- ⇒ Terlaksananya Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi.
- ⇒ Penyelesaian Dokumen Kenaikan Pangkat.
- ⇒ Penyelesaian Dokumen Pensiun.
- ⇒ Tersusunnya Laporan Presentasi Kehadiran PNS dan NonPNS
- ⇒ Tersusunnya rekapitulasi SKP Tahunan
- ⇒ Tersusunnya Peta Jabatan di ANJAB
- ⇒ Menyelesaikan Usulan kebutuhan Pegawai dalam 5 Tahun kedepan
- ⇒ terselesaikannya Laporan Usulan Setya Lencana
- ⇒ Terlaksananya Susunan DUK
- ⇒ Terlaksananya Dokumen Gaji berkala
- ⇒ Terlaksananya Kearsipan Surat masuk dan keluar
- ⇒ Terlaksananya penyusunan Jabatan dan uraian tugas jabatan di aplikasi SIASN Perencanaan

**e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Sub Bagian Keuangan bertanggungjawab menangani kegiatan Administrasi Umum PD yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyediaan Bahan/Material, Fasilitas Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD. Pagu sebesar Rp. 1.083.016.192,- Realisasi Rp. 1.063.444.534,- (98,19%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

- ⇒ Tersedianya Koordinasi dan konsultasi pengelolaan Keuangan daerah baik di tingkat pusat maupun daerah.

- ⇒ Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
- ⇒ Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- ⇒ Tersedianya Bahan/Material

**f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Pagu sebesar Rp 120.764.400,- Realisasi Rp. 120.222.811,- (99,55%). Adapun Output dari Kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- ⇒ Pengadaan komputer
- ⇒ Pegadaan Printer
- ⇒ Pengadaan Leptop

**g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pagu sebesar Rp3.831.375.860,- Realisasi Rp. 3.786.867.560,- (98,84%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

- ⇒ Tersedianya Jasa Surat Menyurat
- ⇒ Tersedianya Gaji Tenaga Kontrak
- ⇒ Tersedianya Jasa Komunikasi dan Internet

**h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Pagu sebesar Rp. 308.455.000,- Realisasi Rp. 308.250.648,- (99.93%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

⇒ Tersedianya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

## **2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

Program Pengelolaan Keuangan Daerah ditangani oleh 4 Bidang yaitu Bidang Anggaran, Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota, Bidang Perbendaharaan dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Dari pagu sebesar Rp. 745.535.766.688,- Realisasi Rp. 671.764.381.067,- (90,10%). Berikut adalah realisasi kinerja per kegiatan:

### **a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**

Kegiatan ini ditangani oleh Bidang Anggaran dengan Pagu sebesar Rp. 9.200.234.333,- Realisasi Rp8.744.406.704 (90,05%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

- ⇒ Koordinasi dan Penyusunan KUA-PPAS serta Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
- ⇒ Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD serta Perubahannya;
- ⇒ Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD serta Perubahannya;
- ⇒ Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD serta Perubahannya;
- ⇒ Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran;
- ⇒ Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan;

- ⇒ Penyusunan Petunjuk Teknis Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- ⇒ Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- ⇒ Menginventarisir pelaksanaan evaluasi Rencana Kerja Anggaran SKPD;
- ⇒ Penyusunan Standar Harga Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

**Tabel. 3.3**  
**Hasil Pelaksanaan Bidang Anggaran**  
**per 31 Desember 2023**

Program	Rincian Kegiatan	Target (Dokumen/Kegiatan /Buku)	Realisasi (Dokumen/Kegiatan /Buku)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Koordinasi penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD TA. 2023	- Proses Stempel dan Pembagian Dokumen Perubahan DPA Reguler SKPD TA. 2023	Dokumen Perubahan DPA-SKPD TA. 2022	Terealisasi
	2. Koordinasi Dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Perubahan Penjabaran APBD	- Rapat terkait Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri RI Terhadap Perda tentang Perubahan APBD Provinsi NTT TA. 2023 dan Pergub Tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi NTT TA. 2023	Pembahasan Ini Sudah Dilaksanakan	Terealisasi
		- Proses Percetakan Dokumen Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 5	Dokumen Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 5 Tahun 2023 tentang	Terealisasi

Program	Rincian Kegiatan	Target (Dokumen/Kegiatan /Buku)	Realisasi (Dokumen/Kegiatan /Buku)	Keterangan
		Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023	Perubahan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023	
		- Proses Percetakan Dokumen Peraturan Gubernur NTT Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023	Dokumen Peraturan Gubernur NTT Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023	Terealisasi
	3. Koordinasi Dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	- Rapat terkait Pembahasan Rencana Kerja Anggaran yang Bersumber dari DAU SG TA. 2024 Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan Bidang Pekerjaan Umum	Pembahasan Ini Sudah Dilaksana nakan	Terealisasi
		- Rapat Paripurna terkait Pembahasan Penyampaian Tanggapan Pj. Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan APBD TA. 2024	Pembahasan Ini Sudah Dilaksana nakan	Terealisasi

Program	Rincian Kegiatan	Target (Dokumen/Kegiatan /Buku)	Realisasi (Dokumen/Kegiatan /Buku)	Keterangan
		- Rapat Badan Anggaran terkait Pembahasan Rancangan APBD TA. 2024	Pembahasan Ini Sudah Dilaksanakan	Terealisasi

**Tabel 3.4**  
**kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023**

NO	NAMA KEGIATAN
1.	Proses Stemple dan Pembagian Dokumen Murni DPA-SKPD TA. 2023
2.	Rapat dalam rangka penyerahan DPA SKPD
3.	Penetapan Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023
4.	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023
5.	Penetapan Peratuaran Gubernur NTT Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023
6.	Penetapan Peratuaran Gubernur NTT Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023
7.	Penetapan Peratuaran Gubernur NTT Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara



	Timur Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023
8.	Rapat terkait Pembahasan Permohonan Penggunaan Dana Biaya Tak Terduga
9.	Rapat terkait Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya
10.	Rapat terkait Pembahasan Detail/Rincian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya
11.	Rapat terkait Pembahasan Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya
12.	Rapat terkait Pembahasan Permohonan Penggunaan Anggran Melampaui Tahun Anggaran
13.	Rapat terkait Pembahasan pengelolaan Dana Alokasi Umum untuk melakukan Finalisasi terhadap rincian alokasi maupun jadwal pelaksanaan
14.	Rapat terkait TPP ASN Tahun Anggaran 2023
15.	Rapat Secara Daring Pelaksanakan Kegiatan Peyusunan Standar Harga Barang dan Jasa Tahun 2024
16.	Rapat terkait Pembahasan Tagihan Angkutan Penyeberangan dan Permohonan Penggunaan Dana BTT
17.	Rapat terkait Pembahasan Permohonan Pengguguran Tanda Bintang pada DPA TA. 2023 dan Pembahasan Tagihan Biaya Pelayanan Pasien Dana Pengaman Provinsi/SKTM
18.	Rapat terkait Pembahasan Rencana Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2023 Tentang TPP Bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintahan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023
19.	Rapat terkait Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2023 Tentang TPP Bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintahan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023
20.	Rapat terkait Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2023
21.	Melakukan Survey Harga Barang dan Jasa di 21 Kabupaten/Kota

22.	Melaksanakan penginputan Survey Harga Barang dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur
23.	Rapat terkait Penyusunan Dokumen Standar Harga Barang Dan Jasa Provinsi NTT Tahun 2024
24.	Rapat terkait Pembahasan Evaluasi Progres Pelaksanaan Tahap I DAU <i>Spesifik Grant</i>
25.	Undangan Rapat terkait Pembahasan Permohonan Usulan Penambahan Anggaran
26.	Melakukan Survey Harga Satuan Biaya Umum Wilaya Kota Kupang
27.	Melaksanakan penginputan Survey Harga Barang Jasa dan Harga Satuan Biaya Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur
28.	Rapat terkait Pembahasan Evaluasi Pelaksanaan Survey Tahap I dan Rencana Survey Tahap ke II
29.	Proses Pembagian Dokumen Perubahan II DPA-SKPD TA. 2023
30.	Rapat terkait Pembahasan Permohonan Pergeseran Anggaran Tahun Anggaran 2023
31.	Rapat terkait Tindak Lanjut Hasil Review Inspektorat Terhadap Pembiayaan Kegiatan Hari Lahir Pancasila Di Kabupaten Ende Tahun 2022 Oleh Bank NTT
32.	Rapat Terkait Pembahasan Usulan Proposal Bantuan Dana dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi NTT Untuk Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024
33.	Rapat Terkait Pembahasan Permohonan Pergeseran Anggaran dan Penambahan Anggaran
34.	Rapat Terkait Pembahasan Lanjutan rincian Usulan Permintaan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) bantuan dana Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024
35.	Melaksanakan penginputan Survey Harga Barang Jasa dan Harga Satuan Biaya Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur
36.	Proses Penandatanganan, Pencetakan dan Pembagian Dokumen Perubahan III DPA-SKPD TA. 2023

37.	Rapat terkait Pembahasan Perihal Penyesuaian Biaya Kontribusi Pelatihan pada SIPD Tahun Anggaran 2023
38.	Rapat terkait Pembahasan evaluasi Progres Pelaksanaan Tahap I
39.	Rapat terkait Penyampaian Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2023
40.	Rapat terkait Pembahasan Laporan Realisasi Penggunaan DAU Spesific Grant Tahap I
41.	Rapat terkait Pembahasan Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2024
42.	Rapat terkait Penyampaian Masukan Komisi-Komisi kepada Bidang Anggaran terkait Dengan Program dan Kegiatan Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2024
43.	Rapat terkait Pembahasan Survey Standar Harga Khusus Sewa Rumah dan Sewa Kendaraan Bagi Anggota DPRD Provinsi NTT
44.	Melaksanakan penginputan Survey Standar Harga Khusus Sewa Rumah dan Sewa Kendaraan Bagi Anggota DPRD Provinsi NTT
45.	Rapat terkait Pembahasan Perihal Usulan Rincian APBD Perubahan Tahun 2023
46.	Rapat terkait Pembahasan Usulan Pergeseran Anggaran
47.	Rapat terkait Pembahasan evaluasi Progres Pelaksanaan DAU specific Grant Tahap I dan Rencana Pelaksanaan Tahap II
48.	Rapat terkait Pelaksanaan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023
49.	Rapat terkait Penyampaian Masukan Komisi-Komisi Kepada Badan Anggaran terkait dengan Program dan Kegiatan Dalam Rancangan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024
50.	Rapat terkait Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh Ketua TAPD
51.	Rapat terkait Pembahasan Survey Standar Harga Khusus Sewa Rumah dan Sewa Kendaraan Bagi Anggota DPRD Provinsi NTT

52.	Proses Percetakan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024
53.	Proses Percetakan Keputusan Gubernur Nomor 255/KEP/HK/2023 Tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2024
54.	Rapat Terkait Pembahasan Perihal Persiapan Penyusunan RAPBD TA. 2024
55.	Rapat Terkait Pembahasan Evaluasi Progres Pelaksanaan DAU Specific Grant Tahap I Dan Tahap II Serta Rencana Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tahap II
56.	Rapat Terkait Pembahasan Rancangan Kerja Anggaran SKPD Tahun 2024
57.	Rapat Terkait Pembahasan Permohonan Pembayaranann Pekerjaan Pembangunan Paddock Besipae
58.	Rapat Terkait Konsultasi Banggar Ke Komisi Terkait Dengan Program Kegiatan Dalam Rancangan PPAS TA. 2024
59.	Rapat Terkait Pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD TA. 2024
60.	Rapat Paripurna Terkait Pembahasan Dan Penetapan Keputusan DPRD Terhadap Rancangan KUA Dan PPAS APBD TA. 2024
61.	Rapat Paripurna Terkait Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Tentang KUA-PPAS APBD TA. 2024
62.	Rapat Paripurna Terkait Penyampaian Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD TA. 2023
63.	Rapat Paripurna Terkait Pembahasan Dan Penetapan Keputusan DPRD Terhadap Rancangan Perubahan KUA Dan PPAS APBD TA. 2023
64.	Rapat Paripurna Terkait Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Tentang Perubahan KUA-PPAS APBD TA. 2024
65.	Rapat Terkait Konsultasi Banggar Ke Komisi Terkait Dengan Program Kegiatan Dalam Rancangan PPAS TA. 2023
66.	Rapat Terkait Pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD TA. 2023
67.	Proses Percetakan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2024

68.	Proses Percetakan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024
69.	Rapat Terkait Pembahasan Perubahan Rancangan Kerja Anggaran SKPD Tahun 2023
70.	Rapat Terkait Pembahasan Evaluasi Progres Pelaksanaan DAU Specific Grant Tahap I Dan Tahap II Serta Rencana Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tahap II
71.	Rapat Paripurna Terkait Penyampaian Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi NTT terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA. 2023
72.	Proses Percetakan Pengantar Nota Keuangan Atas Rancangan Perubahan APBD Provinsi NTT TA. 2023
73.	Proses Percetakan Nota Keuangan Atas Rancangan Perubahan APBD Provinsi NTT TA. 2023
74.	Proses Percetakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi NTT TA. 2023
75.	Proses Percetakan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi NTT TA. 2023
76.	Proses Percetakan Tanggapan Gubernur NTT atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD NTT atas Nota Keuangan Atas Rancangan Perubahan APBD Provinsi NTT TA. 2023
	Proses Percetakan Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi NTT TA. 2023
77.	Proses Percetakan Ringkasan Perubahan APBD Provinsi NTT TA. 2023
78.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD TA. 2023 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD TA. 2023 di Kementrian Dalam Negeri
79.	Rapat Paripurna Terkait Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan APBD TA. 2024
80.	Proses Percetakan Pengantar Nota Keuangan Atas Rancangan APBD Provinsi NTT TA. 2024

81.	Proses Percetakan Nota Keuangan Atas Rancangan APBD Provinsi NTT TA. 2024
82.	Proses Percetakan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi NTT TA. 2024
83.	Proses Percetakan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Provinsi NTT TA. 2024
84.	Rapat Paripurna Terkait Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan APBD TA. 2024
85.	Rapat Paripurna Terkait penetapan perubahan KUA-PPAS APBD TA. 2023
86.	Rapat Paripurna Terkait Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Tentang Perubahan KUA-PPAS TA. 2023
87.	Proses Percetakan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2023
88.	Proses Percetakan Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 dan Penambahan Sub Kegiatan Baru Pada Perubahan PPAS yang tidak Terdapat dalam Perubahan RKPD Provinsi NTT TA. 2023
89.	Proses Percetakan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2024
90.	Rapat Terkait Pembahasan Evaluasi Progres Pelaksanaan DAU Specific Grant Tahap II Dan Rencana Pelaksanaan Tahap III
91.	Rapat Terkait Evaluasi Pembayaran TPP Semester I dan Rencana Verifikasi Dokumen TPP Semester II
92.	Proses Percetakan Dokumen Tanggapan Penjabat Gubernur NTT atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD NTT terhadap Nota Keuangan Atas Rancangan APBD Provinsi NTT TA. 2024
93.	Rapat Paripurna Terkait Tanggapan Penjabat Gubernur NTT atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan APBD Provinsi NTT TA. 2024
94.	Proses Tanda Tangan dan Pencetakan Dokumen Perubahan DPA Reguler SKPD TA. 2023

95.	Rapat Terkait Kekurangan Dana Operasional Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023
96.	Rapat Terkait Kondisi Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT Pasca Gempa Bumi
97.	Rapat Terkait Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Rapat Tim TPP dan Rencana Penyampaian Laporan Penganggaran TPP TA. 2024 ke Kementrian Dalam Negeri
98.	Pelaksanaan Konsultasi Jadwal Pembahasan dan Mengantar Buku Rancangan APBD TA. 2024 di Kementrian Dalam Negeri RI
99.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah APBD TA. 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD TA. 2024 di Kementrian Dalam Negeri
100.	Proses Stempel dan Pembagian Dokumen Perubahan DPA Reguler SKPD TA. 2023
101.	Rapat terkait Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri RI Terhadap Perda tentang Perubahan APBD Provinsi NTT TA. 2023 dan Pergub Tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi NTT TA. 2023
102.	Proses Percetakan Dokumen Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023
103.	Proses Percetakan Dokumen Peraturan Gubernur NTT Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023
104.	Rapat terkait Pembahasan Rencana Kerja Anggaran yang Bersumber dari DAU SG TA. 2024 Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan Bidang Pekerjaan Umum
105.	Rapat Paripurna terkait Pembahasan Penyampaian Tanggapan Pj. Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan APBD TA. 2024
106.	Rapat Badan Anggaran terkait Pembahasan Rancangan APBD TA. 2024

107.	Laporan Realisasi Penyerapan DAU Bidang Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap I Tahun Anggaran 2023
108.	Laporan Realisasi DAU yang Ditentukan Penggunaannya Untuk DAU Bidang Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap III Tahun Anggaran Anggaran 2023
109.	Laporan Realisasi Penyerapan DAU Bidang Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2023
110.	Laporan Realisasi Penyerapan DAU Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap I Tahun Anggaran 2023
111.	Laporan Realisasi Penyerapan DAU Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2023
112.	Laporan Realisasi DAU yang Ditentukan Penggunaannya Untuk DAU Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap III Tahun Anggaran Anggaran 2023
113.	Laporan Realisasi Penyerapan DAU Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap I Tahun Anggaran 2023
114.	Laporan Realisasi Penyerapan DAU Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2023
115.	Laporan Realisasi DAU yang Ditentukan Penggunaannya Untuk DAU Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap III Tahun Anggaran Anggaran 2023
116.	Laporan Realisasi Penyerapan DAU Bidang Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap I Tahun Anggaran 2023
117.	Laporan Realisasi Penyerapan DAU Bidang Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2023
118.	Laporan Realisasi DAU yang Ditentukan Penggunaannya Untuk DAU Bidang Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap III Tahun Anggaran Anggaran 2023



119.	Penetapan Dokumen Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 (Murni)
120.	Penetapan Dokumen Keputusan Gubernur Nomor 239/KEP/HK/2022 Tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2023 (Murni)
121.	Penetapan Dokumen Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 (Perubahan)
122.	Penetapan Dokumen Keputusan Gubernur Nomor 439/KEP/HK/2022 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 239/KEP/HK/2022 Tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2023
123.	Penetapan Dokumen Peraturan Gubernur Nomor 57E Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2023
124.	Penetapan Dokumen Peraturan Gubernur Nomor 57D Tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2022 Tentang Analisis Standar Belanja
125.	Penetapan Dokumen Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2023 Tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD NTT
126.	Penetapan Dokumen Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2023 Tentang Standar kebutuhan minimal rumah tangga pimpinan DPRD NTT

**b. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan ini ditangani oleh Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota dengan Pagu sebesar Rp2.383.524.700,- Realisasi Rp. 2.340.693.226 (98,20%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan dijelaskan dalam tabel berikut ini:

⇒ Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi wilayah I (Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo,

Sikka, Ende, Flores Timur, Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan TTS);

⇒ Bidang Pembinaan dan Evaluasi wilayah II (Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Lembata, Alor, Sabu Raijua, TTU, Belu, Malaka dan Rote Ndao.

Tabel. 3.5  
Hasil Pelaksanaan Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota Badan  
Keuangan Daerah  
per 31 Desember 2023

NO	PROGRAM/ KEGIATAN /RINCIAN KERJA	BENTUK/ WUJUD	REALISASI	KETERANGAN
PROGRAM : PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
KEGIATAN : PEMBINAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
A.	Sub kegiatan :  Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota dengan rincian kegiatan sebagai berikut :			
	1. Memeriksa kelengkapan dokumen evaluasi Rancangan Peraturan Daerah APBD Murni TA 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA 2024 sesuai Lampiran Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 903/2347/BKUD5.3/2023 Tanggal 10 November 2023 Perihal Percepatan Penyusunan RAPBD kabupaten/kota TA 2024	Dokumen evaluasi Rancangan Peraturan Daerah APBD Murni TA 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Murni TA 2024 Kabupaten Ngada, Kabupaten Sumba Timur,	Kelengkapan dan keabsahan dokumen evaluasi Ranperda APBD Murni TA 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Murni TA 2024 Ngada, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten	

		Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten TTU, Kabupaten Alor, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sabu, Raijua, Kabupaten Nagekeo, Kota Kupang, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, Kabupaten SBD, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabuparen TTS, Kabupaten Flotim Dan Kabupaten Malaka	TTU, Kabupaten Alor, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sabu, Raijua, Kabupaten Nagekeo, Kota Kupang, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, Kabupaten SBD, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabuparen TTS, Kabupaten Flotim Dan Kabupaten Malaka	
	2. Menyusunan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 900.1/2516/BKUD5.2/2023 Tanggal 4 Desember 2023 dalam rangka untuk bekerja di luar jam dinas untuk persiapan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 900.1/2516/BKU D5.2/2023 Tanggal 4 Desember 2023 dalam rangka untuk bekerja di	ASN bidang Pembinaan Keuangan Kab/Kota telah melaksanakan tugas diluar jam dinas dalam rangka persiapan evaluasi RANPERDA tentang Perubahan APBD kab/kota dan	Pelaksanaan tugas diluar jam dinas dilaksanakan pada Tanggal 4 sampai dengan 13 Desember 2003

	TA 2024 terhitung mulai tanggal 4 sampai dengan 13 Desember 2003	luar jam dinas untuk persiapan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota TA 2024 terhitung mulai tanggal 4 sampai dengan 13 Desember 2003	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD kab/Kota TA 2023	
	3. Rekapitulasi data Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Surat Gubernur Nomor 900/183/BKUD5.3/2023 Tanggal 25 Januari 2023 Hal Data Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah	Data Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya data Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah. Kabupaten/Kota yang telah menyampaikan sebagai berikut : <b>1) Data Perda</b> a. Kab. TTS b. Kab. Belu c. Kab. Rote Ndao d. Kab. Ngada e. Kab. Alor f. Kab. Sumba Timur g. Kab. TTU <b>2) Data Perkada</b> a. Kab. Ngada b. Kab. TTS c. Kab. Belu d. Kab. Rote Ndao e. Kab. Alor f. Kab. Sumba Timur g. Kab. TTU	Data Perda dan Perkada masih tersisa 16 kab/kota yang belum menyampaikan. Akan diminta pada bulan-bulan berikutnya.

	4. Pelaksanaan Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten kabupaten Ngada	Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten kabupaten Ngada	Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/235/BKUD5/2023 Tanggal 8 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.	Evaluasi dilaksanakan pada hari Kamis, 30 November 2023
	5. Pelaksanaan Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten kabupaten Sumba Timur	Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten kabupaten Sumba Timur	Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/238/BKUD5/2023 Tanggal 13 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Evaluasi dilaksanakan pada hari Senin, 4 Desember 2023
	6. Pelaksanaan Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten kabupaten Sumba Barat	Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten kabupaten Sumba Barat	Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/239/BKUD5/2023 Tanggal 13 Desember 2023 tentang Hasil	Evaluasi dilaksanakan pada hari Selasa, 5 Desember 2023

			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	
	7. Pelaksanaan Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten kabupaten Sumba Tengah	Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten kabupaten Sumba Tengah	Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/240/BKUD5/2023 Tanggal 14 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Evaluasi dilaksanakan pada hari Selasa, 5 Desember 2023
	8. Pelaksanaan Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten Rote Ndao	Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten Rote Ndao	Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/241/BKUD5/2023 Tanggal 14 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Evaluasi dilaksanakan pada hari Rabu, 6 Desember 2023

	9. Pelaksanaa Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten kabupaten TTU	Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten kabupaten TTU	Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/242/BKUD5/2023 Tanggal 15 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten TTU Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Evaluasi dilaksanakan pada hari Rabu, 6 Desember 2023
	10.Pelaksanaan Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten kabupaten Alor	Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten kabupaten Alor	Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Kabupaten Alor Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Evaluasi dilaksanakan pada hari Kamis, 7 Desember 2023
	11.Pelaksanaan Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten kabupaten Kupang	Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten kabupaten Kupang	Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/246/BKUD5/2023 Tanggal 18 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja	Evaluasi dilaksanakan pada hari Jumat, 8 Desember 2023



			Daerah Tahun Anggaran 2024	
	12.Pelaksanaan Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten kabupaten Sabu Raijua	Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten kabupaten Sabu Raijua	Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/247/BKUD5/2023 Tanggal 18 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Evaluasi dilaksanakan pada hari Senin, 11 Desember 2023
	13.Pelaksanaan Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten kabupaten Nagekeo	Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten kabupaten Nagekeo	Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/245/BKUD5/2023 Tanggal 18 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Evaluasi dilaksanakan pada hari Senin, 11 Desember 2023
	14.Pelaksanaan Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kota Kupang	Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kota Kupang	Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/250/BKUD5/2023	Evaluasi dilaksanakan pada hari Selasa, 12 Desember 2023

			Tanggal 19 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	
	15.Pelaksanaan Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten Manggarai Timur	Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 kabupaten Manggarai Timur	Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/249/BKUD5/2023 Tanggal 19 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Evaluasi dilaksanakan pada hari Selasa, 12 Desember 2023
	16.Pelaksanaan Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten Manggarai	Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten Manggarai	Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/251/BKUD5/2023 Tanggal 20 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja	Evaluasi dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Desember 2023

			Daerah Tahun Anggaran 2024	
	17.Pelaksanaan Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten SBD	Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten SBD	Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/252/BKUD5/2023 Tanggal 20 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten SBD Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Evaluasi dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Desember 2023
	18.Pelaksanaan Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten Ende	Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten Ende	Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/253/BKUD5/2023 Tanggal 21 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Evaluasi dilaksanakan pada hari Kamis, 14 Desember 2023
	19.Pelaksanaan Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten Sikka	Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten Sikka	Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/254/BKUD5/2023	Evaluasi dilaksanakan pada hari Kamis, 14 Desember 2023

			Tanggal 21 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	
	20.Pelaksanaan Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten TTS	Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten TTS	Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/255/BKUD5/2023 Tanggal 21 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten TTS Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Evaluasi dilaksanakan pada hari Kamis, 14 Desember 2023
	21.Pelaksanaan Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten Flores Timur	Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten Flores Timur	Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/256/BKUD5/2023 Tanggal 22 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Tentang Anggaran Pendapatan	Evaluasi dilaksanakan pada hari Jumat, 15 Desember 2023

			dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	
	22.Pelaksanaan Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten Malaka	Evaluasi dokumen RAPBD TA 2024 Kabupaten Malaka	Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/257/BKUD5/2023 Tanggal 22 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Evaluasi dilaksanakan pada hari Sabtu, 16 Desember 2023
	23.Penyampaian Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 903/2435/BKUD5.2/2023 Tanggal 23 November 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 kabupaten Lembata	Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 903/2435/BKUD 5.2/2023 Tanggal 23 November 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD	Dikeluarkannya rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/1773/SD.IV/DI T.I/XII/KEUDA/2003 Tanggal 28 Novemer 2023 Hal hasil konsultasi evaluasi Rancangan Perda Kabupaten LembataTentang APBD TA 2024.	

		TA 2024 kabupaten Lembata		
	24.Penyampaian Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 903/2440/BKUD5.1/2023 Tanggal 24 November 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabaran APBD TA 2024 kabupaten Manggarai Barat	Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 903/2440/BKUD 5.1/2023 Tanggal 24 November 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabaran APBD TA 2024 kabupaten Manggarai Barat	Dikeluarkannya rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/1800/SD.IV/DI T.I/XII/KEUDA/2003 Tanggal 4 Desember 2023 Hal hasil konsultasi evaluasi Rancangan Perda Kabupaten Manggarai Barat Tentang APBD TA 2024.	
	25.Penyampaian Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 903/2470/BKUD5.3/2023 Tanggal 30 November 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda	Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 903/2470/BKUD 5.3/2023 Tanggal	Dikeluarkannya rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/1812/SD.IV/DI T.I/XII/KEUDA/2003 Tanggal 5 Desember 2023 Hal hasil konsultasi evaluasi	

	tentang Penjabaran APBD TA 2024 kabupaten belu	30 November 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabaran APBD TA 2024 kabupaten belu	Rancangan Perda Kabupaten Belu Tentang APBD TA 2024.	
	26.Penyampaian Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 903/2470/BKUD5.3/2023 Tanggal 30 November 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabaran APBD TA 2024 kabupaten Ngada	Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 903/2471/BKUD 5.3/2023 Tanggal 30 November 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabaran APBD TA 2024 kabupaten Ngada	Dikeluarkannya rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/1811/SD.IV/DI T.I/XII/KEUDA/2003 Tanggal 5 Desember 2023 Hal hasil konsultasi evaluasi Rancangan Perda Kabupaten NgadaTentang APBD TA 2024.	
	27.Penyampaian Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 903/2504/BKUD5.2/2023	Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah	Dikeluarkannya rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/1889/SD.IV/DI T.I/XII/KEUDA/2003	

	Tanggal 4 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 kabupaten Sumba Timur	Nomor 903/2504/BKUD 5.2/2023 Tanggal 4 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 kabupaten Sumba Timur	Tanggal 11 Desember 2023 Hal hasil konsultasi evaluasi Rancangan Perda Kabupaten Sumba Timur Tentang APBD TA 2024.	
	28.Penyampaian Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 903/2522/BKUD5.2/2023 Tanggal 5 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 kabupaten Sumba Barat	Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 903/2522/BKUD 5.2/2023 Tanggal 5 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 kabupaten Sumba Barat	Dikeluarkannya rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/1880/SD.IV/DI T.I/XII/KEUDA/2003 Tanggal 10 Desember 2023 Hal hasil konsultasi evaluasi Rancangan Perda Kabupaten Sumba Barat Tentang APBD TA 2024.	
	29.Penyampaian Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke	Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara	Dikeluarkannya rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Negeri Cq.	



	Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2565/BKUD5.2/2023 Tanggal 7 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 kabupaten Alor	Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2565/BKUD5.2/2023 Tanggal 7 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 kabupaten Alor	Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/1896/SD.IV/DI T.I/XII/KEUDA/2003 Tanggal 11 Desember 2023 Hal hasil konsultasi evaluasi Rancangan Perda Kabupaten Alor Tentang APBD TA 2024.	
	30.Penyampaian Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2575/BKUD5.1/2023 Tanggal 8 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 kabupaten Rote Ndao	Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2541/BKUD5.1/2023 Tanggal 6 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 kabupaten Rote Ndao	Dikeluarkannya rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/1898/SD.IV/DI T.I/XII/KEUDA/2003 Tanggal 11 Desember 2023 Hal hasil konsultasi evaluasi Rancangan Perda Kabupaten Rote Ndao Tentang APBD TA 2024.	

	31.Penyampaian Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2575/BKUD5.1/2023 Tanggal 8 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 kabupaten TTU	Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2541/BKUD5.1/2023 Tanggal 6 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 kabupaten TTU	Dikeluarkannya rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/1902SD.IV/DIT.I/XII/KEUDA/2003 Tanggal 11 Desember 2023 Hal hasil konsultasi evaluasi Rancangan Perda Kabupaten TTU Tentang APBD TA 2024.	
	32.Penyampaian Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2575/BKUD5.1/2023 Tanggal 8 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 kabupaten Kupang	Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2575/BKUD5.1/2023 Tanggal 8 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang	Dikeluarkannya rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/1932/SD.IV/DIT.I/XII/KEUDA/2003 Tanggal 13 Desember 2023 Hal hasil konsultasi evaluasi Rancangan Perda Kabupaten Kupang Tentang APBD TA 2024.	

		Penjabara APBD TA 2024 kabupaten Kupang		
	33.Penyampaian Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2593/BKUD5.2/2 023 Tanggal 11 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 kabupaten Sabu Raijua	Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2593/BK UD5.2/2023 Tanggal 11 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 kabupaten Sabu Raijua	Dikeluarkannya rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2016/SD.IV/DI T.I/XII/KEUDA/2003 Tanggal 15 Desember 2023 Hal hasil konsultasi evaluasi Rancangan Perda Kabupaten Sabu Raijua Tentang APBD TA 2024.	
	34.Penyampian Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2594/BKUD5.1/2 023 Tanggal 11 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD	Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2594/BK UD5.1/2023	Dikeluarkannya rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2017/SD.IV/DI T.I/XII/KEUDA/2003 Tanggal 15 Desember 2023 Hal hasil konsultasi evaluasi	

	TA 2024 kabupaten Nagekeo	Tanggal 11 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 kabupaten Nagekeo	Rancangan Perda Kabupaten Nagekeo Tentang APBD TA 2024.	
	35.Penyampaian Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2605/BKUD5.1/2023 Tanggal 12 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 kabupaten Manggarai Timur	Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2605/BKUD5.1/2023 Tanggal 12 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 kabupaten Manggarai Timur	Dikeluarkannya rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/1974/SD.IV/DI T.I/XII/KEUDA/2003 Tanggal 15 Desember 2023 Hal hasil konsultasi evaluasi Rancangan Perda Kabupaten Manggarai Timur Tentang APBD TA 2024.	
	36.Penyampaian Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan	Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq.	Dikeluarkannya rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor	

	Daerah Nomor 900.1.1/2604/BKUD5.2/2 023 Tanggal 12 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 Kota Kupang	Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2604/BK UD5.2/2023 Tanggal 12 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 Kota Kupang	900.1.1/2014/SD.IV/DI T.I/XII/KEUDA/2003 Tanggal 15 Desember 2023 Hal hasil konsultasi evaluasi Rancangan Perda Kota Kupang Tentang APBD TA 2024.	
	37.Penyampaian Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2612/BKUD5.2/2 023 Tanggal 13 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 Kabupaten SBD	Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2612/BK UD5.2/2023 Tanggal 13 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 Kabupaten SBD	Dikeluarkannya rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2059/SD.IV/DI T.I/XII/KEUDA/2003 Tanggal 19 Desember 2023 Hal hasil konsultasi evaluasi Rancangan Perda Kabupaten SBD Tentang APBD TA 2024.	
	38.Penyampaian Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa	Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi	Dikeluarkannya rekomendasi dari Kementerian Dalam	

	Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2611/BKUD5.2/2023 Tanggal 13 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 Kabupaten Manggarai	Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2611/BKUD5.2/2023 Tanggal 13 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 Kabupaten Manggarai	Negeri Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2056/SD.IV/DI T.I/XII/KEUDA/2003 Tanggal 19 Desember 2023 Hal hasil konsultasi evaluasi Rancangan Perda Kabupaten Manggarai Tentang APBD TA 2024.	
	39.Penyampaian Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2619/BKUD5.2/2023 Tanggal 14 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 Kabupaten Sikka	Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2619/BKUD5.2/2023 Tanggal 14 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD	Dikeluarkannya rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2053/SD.IV/DI T.I/XII/KEUDA/2003 Tanggal 19 Desember 2023 Hal hasil konsultasi evaluasi Rancangan Perda Kabupaten Sikka Tentang APBD TA 2024.	

		TA 2024 Kabupaten Sikka		
	40.Penyampaian Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2620/BKUD5.2/2 023 Tanggal 14 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 Kabupaten TTS	Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2620/BK UD5.2/2023 Tanggal 14 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 Kabupaten TTS	Dikeluarkannya rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2054/SD.IV/DI T.I/XII/KEUDA/2003 Tanggal 19 Desember 2023 Hal hasil konsultasi evaluasi Rancangan Perda Kabupaten TTS Tentang APBD TA 2024.	
	41.Penyampaian Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2618/BKUD5.2/2 023 Tanggal 14 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 Kabupaten Ende	Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2618/BK UD5.2/2023 Tanggal 14 Desember 2023 Hal Konsultasi	Dikeluarkannya rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2055/SD.IV/DI T.I/XII/KEUDA/2003 Tanggal 19 Desember 2023 Hal hasil konsultasi evaluasi Rancangan Perda Kabupaten Ende Tentang APBD TA 2024.	

		Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 Kabupaten Ende		
	42.Penyampaian Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2637/BKUD5.2/2 023 Tanggal 15 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 Kabupaten Flotim	Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2637/BK UD5.2/2023 Tanggal 15 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 Kabupaten Flotim	Dikeluarkannya rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2185/SD.IV/DI T.I/XII/KEUDA/2003 Tanggal 22 Desember 2023 Hal hasil konsultasi evaluasi Rancangan Perda Kabupaten Flotim Tentang APBD TA 2024.	
	43.Penyampaian Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2637/BKUD5.2/2 023 Tanggal 15 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda	Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2637/BK UD5.2/2023	Dikeluarkannya rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2184/SD.IV/DI T.I/XII/KEUDA/2003 Tanggal 22 Desember 2023 Hal hasil konsultasi evaluasi	



	tentang Penjabara APBD TA 2024 Kabupaten Malaka	Tanggal 15 Desember 2023 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang Penjabara APBD TA 2024 Kabupaten Malaka	Rancangan Perda Kabupaten malaka Tentang APBD TA 2024.	
B.	Sub kegiatan : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota			Telahselesai dilaksanakan
C.	Sub kegiatan : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dengan rincian kegiatan sebagai berikut :			Telahselesai dilaksanakan
D.	Sub kegiatan :			Telahselesai dilaksanakan

	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota dengan rincian kegiatannya yaitu Rapat Koordinasi Keuangan Daerah			
E.	Sub kegiatan : Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi Laporan Keuangan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah dengan rincian kegiatan sebagai berikut :			
	1. Program Pengelolaan Keuangan daerah dengan rincian kegiatan Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada 22 Kabupaten/Kota	List rekapan LRA Kabupaten/Kota keadaan sampai dengan 31 Desember 2023 sebanyak 1 (satu) dokumen	1 (satu) list rekapan LRA Kabupaten/Kota dan telah dikirimkan kepada Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia dan Kanwil Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Berlanjut untuk bulan Desember Tahun 2023 yang akan dilaporkan di bulan Januari Tahun 2024
	2. Menyusun Data Statistik Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021	Draf daftar/list Data Statistik Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021	Draf data Statistik Keuangan Daerah Tahun 2021	Telah selesai dilaksanakan
	3. Konsep Statistik Keuangan Daerah Tahun 2022 untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota	Konsep Statistik Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022	Konsep Statistik Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022	Berlanjut untuk bulan-bulan berikutnya
F.	Sub kegiatan :			

LAPORAN TAHUNAN 2023

	Pelaksanaan Kegiatan Umum dengan rincian kegiatan sebagai berikut :			
	1. Penyusunan laporan kegiatan bulan Desember 2023	Laporan kegiatan bulan Desember 2023	Disampaikannya laporan kegiatan bidang pembinaan kab/kota bulan Desember 2023 kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Telah dsampaikannya pada hari Kamis, 4 Januari 2024 ke Sekretariat Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT
	2. Pelaksanaan kegiatan Bimtek pendalaman tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Perencanaan dan Penanganggaran Keuangan Daerah	Kegiatan Bimtek pendalaman tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Perencanaan dan Penanganggaran Keuangan Daerah		Telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023
	3. Melakukan diskusi bersama BI tentang Realisasi APBD Kabupaten/Kota keadaan sampai dengan 11 Desember 2023	Diskusi bersama BI tentang Realisasi APBD Kabupaten/Kota keadaan 11 Desember 2023	Terinformasinya data realisasi pendapatan belanja dan pembiayaan keadaan sampai dengan 11 Desember 2023 untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur dan 22 Kabupaten/Kota	Telah selesai dilaksanakan
	4. Pelaksanakan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah	Penandatanganan NPHD KPU	NPHD KPU 1 Dokumen	Telah selesai dilaksanakan

	(NPHD) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanggal 18 Desember 2023	Tanggal 18 Desember 2023		
	5. Berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tanggal 20 Desember 2023			Berlanjut untuk bulan-bulan berikutnya

Pada Tahun Anggaran 2023 Bidang Pembinaan Kabupaten/Kota telah melaksanakan kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Laporan realiasis Anggaran (LRA) pada 22 Kabupaten/Kota. Data LRA tersebut juga di disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri RI cq. Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah, Kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT dan Bank Indonesia.
2. Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada 22 Kabupaten/Kota akhir 31 setiap bulan pada tahun 2023 dengan capaian kinerja output tersedianya data LRA 22 Kabupaten/Kota. Data LRA tersebut juga disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri RI cq. Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT dan Bank Indonesia.
3. Melaksanakan sanding banding hasil evaluasi Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan APBD 2023 dengan capaian kinerja output tersedianya 1 (satu) dokumen sanding banding hasil evaluasi Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.
4. Inventarisir Tindak Lanjut Evaluasi RAPBD 22 Kab/Kota dengan capaian kinerja output tersedianya 1 (satu) dokumen hasil tindaklanjut evaluasi RAPBD 22 kab/kota Tahun Anggaran 2023.
5. Rekapitulasi Penentuan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) kab/kota dengan capaian kinerja output tersedianya 1 (satu) laporan Penentuan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) 22 kab/kota Tahun Anggaran 2023.
6. Rekapitulasi regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah berupa 1 Peraturan Daerah dan 4 Peraturan Kepala Daerah dengan capaian kinerja output terinventarisir data regulasi penetapan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah dan 4 Peraturan Kepala Daerah. Informasi yang telah tersedia berjumlah 7 (tujuh) dokumen dari 7 Kabupaten, yakni: Kabupaten TTS, Kabupaten Belu, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Ngada, Kabupaten Alor, Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten TTU serta Daerah lainnya yang akan terus diminta.

7. Rapat koordinasi dengan kantor perwakilan Bank Indonesia terkait pengendalian inflasi dengan mekanisme penyampaian materi dan diskusi dengan capaian kinerja output adanya informasi terkait pengendalian inflasi dari sudut pandang tata kelola pengelolaan keuangan daerah di Provinsi dan kab/kota yang dilaksanakan secara tertib yang ditinjau dari struktur APBD.
8. FGD analisis ekonomi regional, pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan kas pemerintah pusat dan monitoring dan evaluasi penyaluran DAK fisik dan dana desa TA 2022 dengan capaian kinerja output terinformasinya materi terkait Perencanaan dan pengelolaan keuangan 22 kabupaten/kota, Realisasi APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan 31 Desember 2022, permasalahan umum penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2022 dan rekomendasi serta upaya yang dilakukan dalam rangka penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2022.
9. Rekapitulasi tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota Tahun Tahun Anggaran 2009 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 dengan capaian kinerja output tersedianya 1 (satu) laporan kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2009 sampai dengan Tahun Anggaran 2021.
10. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di Provinsi NTT (Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT) dengan capaian kinerja output adanya 1 (satu) laporan pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di Provinsi NTT (Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT).
11. Mengikuti sosialisasi dari DJP pajak tentang validasi dari NPWP ke NIK dengan capaian kinerja output Adanya informasi terkait validasi dari NPWP ke NIK dari DJP pajak yang diikuti oleh ASN Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.
12. Inventarisir laporan DBH-CHT Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 Tersedianya 1 (satu) laporan DBH-CHT Tahun Anggaran 2023 Kabupaten/Kota.

13. Inventarisir data penganggaran penyertaan modal Tahun Anggaran 2023 dan data realisasi penyertaan modal Tahun Anggaran 2022 dengan capaian kinerja output adanya informasi terkait data penganggaran penyertaan modal Tahun Anggaran 2023 dan data realisasi penyertaan modal Tahun Anggaran 2022 Kabupaten/Kota pada Bank NTT dan BUMD lainnya.
14. Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023 ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah di Jakarta, Inspektur Daerah Provinsi NTT dan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan RI Provinsi NTT dengan capaian kinerja output terinformasinya hasil evaluasi APBD 22 Kab/Kota se-Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.
15. Rekapitulasi data penganggaran pendanaan bersama Pemilukada serentak Tahun 2024 dengan capaian kinerja output tersedianya 1 (satu) laporan penganggaran pendanaan bersama Pemilukada serentak Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024 Kabupaten/Kota.
16. Penyampaian laporan Realisasi Penggunaan DBH-CHT Semester II TA 2022 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Cq. Dirjen Perimbangan Keuangan RI di Jakarta dengan capaian kinerja output terinformasinya 1 (satu) laporan Realisasi Penggunaan DBH-CHT Semester II TA 2022 kab/kota.
17. Rekapitulasi data BLUD kab/kota TA 2023 dengan capaian kinerja output adanya 1 (satu) laporan Pengelolaan BLUD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun 2023.
18. Pelaksanaan FGD pengelolaan BLUD secara daring/virtual/zoom meeting dengan pemerintah kabupaten/kota dengan capaian kinerja output hadirnya para peserta dari 22 Kabupaten/Kota pada FGD/BLUD antara lain Kepala Badan Keuangan Daerah/PPKD Kabupaten/Kota, Kepala Bidang/Kepala Sub Bidang Anggaran/Akuntansi pada Badan Keuangan Daerah/PPKAD, Bagian

- Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota dan Pejabat pengelola BLUD yang termuat dalam 1 (satu) dokumen.
19. Pembentukan tim pengendali pelaksanaan bantuan keuangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan capaian kinerja output adanya 1 (satu) Naskah Dinas terkait Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/77/BKUD5/2023 Tanggal 1 Maret 2023 Tentang Pembentukan Tim Pengendali Pelaksanaan Bantuan Keuangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
  20. Pelaksanaan rekonsiliasi Rancangan Kegiatan Penganggaran DBH-CHT Tahun 2023 Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja output tersusunnya RKP DBH-CHT Tahun Anggaran 2023 sesuai PMK 215 /PMK.07 /2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang termuat dalam 1 (satu) dokumen.
  21. Rapat pembahasan skema perhitungan BANKEU dengan capaian kinerja output disepakatinya draft kebijakan/formulasi BANKEU Provinsi NTT yang termuat dalam 1 (satu) draft Naskah Dinas.
  22. Mengikuti FGD terkait Penatausahaan barang milik daerah dan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan capaian kinerja output 1 (satu) dokumen penyampaian materi yang disampaikan oleh kabid Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota terkait perbandingan LHP BPK Tahun 2020 dan Tahun 2021 Rekapitulasi temuan BPK atas laporan keuangan kab/kota se-NTT Tahun Anggaran 2021.
  23. Rapat koordinasi dan konsultasi dengan Tim Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait penganggaran dan pelaporan jasa pelayanan nakes tentang covid-19 kabupaten Flores Timur dengan capaian kinerja output adanya kesepakatan terkait:
    1. Dana transfer yang masuk ke kas daerah bukan merupakan retribusi sehingga dialokasikan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah;



2. Retribusi daerah ditetapkan dengan Perda;
  3. Jasa pelayanan nakes merupakan bagian dari piutang yang akan dicatat pada LRA RSUD kab. Flotim dan dikonsolidasikan dalam LRA Kabupaten Flotim;
  4. Salah satu rekomendasi dari BPK yakni agar dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
24. Rapat koordinasi dan konsultasi dengan dengan DPRD kabupaten Sabu Raijua terkait Penganggaran program/kegiatan pada APBD Tahun Anggaran 2023 dengan capaian kinerja output terinformasinya DAU yang dialokasi terdiri atas 2 skema yakni:
1. Skema *specific grand* dan *block grand*;
  2. *Specific grand* di merupakan DAU yang diperuntukan hanya pada bagian: penggajian formasi PPPK, pendanaan Kelurahan, bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum sedangkan untuk *block grand* Penggunaan diserahkan menurut kewenangan daerah sesuai dengan prioritas daerah;
  3. Pada Tahun Anggaran 2023 kabupaten Sabu Raijua *mendapat insentif fiscal* yang berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/ atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. Insentif fiskal ini diberikan pada daerah yang berkinerja baik atau daerah tertinggal.
25. Rapat Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait penyusunan RENSTRA Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan capaian kinerja output terinformasinya terkait rencana kegiatan perbidang dan adanya informasi terkait RENSTRA Badan keuangan Daerah Provinsi NTT.
26. Sosialisasi TPP terkait Peraturan Gubernur nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT dengan capaian kinerja output adanya informasi dan petunjuk terkait TTP berdasarkan Peraturan

- Gubernur nomor 3 Tahun 2023 tentang tambahan penghasilan pegawai bagi pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
27. Pelaksanaan rekonsiliasi sisa DBH-CHT TA 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/Kota secara *virtual zoom meeting* narasumber dari Kemenkeu RI dengan capaian kinerja output adanya informasi dan penyesuaian data sisa DBH-CHT TA 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/Kota seperti: nomenklatur kegiatan, pagu anggaran, jenis satuan, realisasi dan nama pejabat penandatanganan berita acara pada 22 kabupaten/kota yang termuat dalam 1 (satu) dokumen.
  28. Pelaksanaan rapat koordinasi persiapan penyusunan APBD dalam rangka evaluasi RAPBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 dengan capaian kinerja output terselenggaranya rapat koordinasi persiapan penyusunan APBD dalam rangka evaluasi RAPBD kabupaten/kota TA 2024 dengan dihadiri lebih kurang 100 orang terdiri dari panitia penyelenggara dan peserta rapat yang termuat dalam 1 (satu) dokumen.
  29. Rekapitulasi data Pernyataan Penganggaran Kembali Sisa DBH CHT sampai dengan Tahun Anggaran 2022 dari Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja output 1 (satu) dokumen Penganggaran Kembali Sisa DBH CHT sampai dengan Tahun Anggaran 2022 dari Provinsi dan 22 Kabupaten/Kota.
  30. Pembentukan Tim Pelaksana Rapat Koordinasi Keuangan Daerah Antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja output adanya 1 (satu) Naskah Dinas terkait Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/50/BKUD5/2023 Tanggal 1 Februari 2023 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Rapat Koordinasi Keuangan Daerah Antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
  31. Pelaksanaan Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan capaian kinerja output adanya informasi yang termuat dalam 1 (satu) dokumen terkait:

1. Reformasi kebijakan pemberian DAU baik specific Grant maupun Block Grant;
2. Optimalisasi Peran SIPD dalam mendukung system digitalisasi pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik;
3. Diskusi kelompok terkait permasalahan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawab serta pengelolaan asset daerah;
4. Peninjauan lapangan dalam kaitan dengan upaya peningkatan PAD;
5. Perencanaan dan penetapan kabupaten yang menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pada Bulan Mei 2024 di Kabupaten Rote Ndao. Dihadiri peserta Rakor dari Kab. Manggarai Barat, Kab. Manggarai, Kab Manggarai Timur, Kab. Ngada, Kab. Nagekeo, Kab. Sikka, Kab. Flotim, Kab. Sumba Timur, Kab. Sumba Barat, Kab. Sumba Tengah, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Alor, Kab. Lembata, Kab. Sabu Raijua, Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. TTU, Kab. TTS, Kab. Belu, Kab. Malaka dan Kab. Rote Ndao dengan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri RI dan PT Bank NTT.
32. Rapat koordinasi terkait surat bupati Belu Nomor 005/1182/BKUD5.2/2023 Tanggal 5 Juni 2023 hal Undangan. Rapat tersebut dihadiri oleh bersama pejabat yang mewakili Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Organisasi dan Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan capaian kinerja output adanya informasi dan kesepakatan rapat yang dituangkan dalam 1 (satu) laporan notulensi rapat sebagai informasi dalam menjawab surat Bupati Belu.
33. Rapat koordinasi terkait Bidang Penegakkan Hukum bersama Dinas Perindag Provinsi NTT, Bea Cukai, Satpol PP Provinsi NTT, Satpol PP Kota Kupang dan Satpol PP Kabupaten Kupang dengan capaian kinerja output adanya informasi dan kesepakatan bersama terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan operasi bersama cukai rokok ilegal.

34. Rapat koordinasi dengan Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait Surat Bupati Sumba Barat Nomor P.495/BKAD/53.12/06/2023 Tanggal 12 Juni 2023 Hal Permohonan Rekomendasi tentang Pendanaan Pemilukada Tahun 2024 dengan capaian kinerja output adanya informasi dan kesepakatan terkait item pendanaan pemilukada pada KPU, BAWASLU dan Kepolisian Resort Sumba Barat.
35. Rapat koordinasi dengan perwakilan Bank Indonesia terkait realisasi anggaran pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se- NTT Keadaan: Sampai dengan Mei 2023, dengan capaian kinerja output terinformasinya alokasi dan realisasi APBD Pemerintah Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota se-NTT serta diskusi terkait persoalan yang mengakibatkan realisasi rendah serta potensi pendapatan daerah di Provinsi NTT.
36. Rapat sosialisasi tentang metode analisis pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bagian dalam materi evaluasi Ranperda pertanggungjawaban kabupaten/kota bagi seluruh PNS pada bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja output adanya informasi tentang metode analisis pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bagian dalam materi evaluasi Ranperda pertanggungjawaban kabupaten/kota bagi seluruh PNS pada bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota.
37. Pembentukan Tim Pelaksana Sosialisasi dan Pemantauan Cukai Rokok Ilegal di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2023 dengan capaian kinerja output 1 (satu) Naskah Dinas terkait Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/123/BKUD5/2023 Tanggal 12 Juni 2023 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sosialisasi dan Pemantauan Cukai Rokok Ilegal di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2023.
38. Sosialisasi dan operasi bersama penegakan hukum Cukai Rokok Ilegal di wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang dengan capaian kinerja output adanya sosialisasi dan operasi bersama dilaksanakan di wilayah Kota Kupang pada 6 (enam) Kecamatan di Wilayah Kota

Kupang yakni: Kecamatan Oebobo, Kecamatan Kota Raja, Kecamatan Kota Lama, Kecamatan Kelapa Lima dan Kecamatan Maulafa dan Kecamatan Alak. Untuk Wilayah Kabupaten Kupang di 3 (tiga) wilayah yakni: Kecamatan Kupang Tengah, Kecamatan Kupang Timur dan Kecamatan Taebenu yang termuat dalam 1 (satu) dokumen.

39. Rapat terkait Penganggaran Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dalam rangka Pemilihan Umum Serentak Kepala Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 dengan capaian kinerja output adanya informasi dalam rangka persetujuan kerja sama terkait Penganggaran Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian pada Pemilihan Umum Serentak Kepala Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan 22 Kab/Kota Tahun 2024.
40. Rapat koordinasi kesiapan penganggaran pemilukada serentak Tahun 2024, sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan bagi penyelenggara Pemilukada dan optimalisasi PAD dengan capaian kinerja output 1 (satu) dokumen penyampaian materi dan diskusi serta tanya jawab terkait kesiapan penganggaran pemilukada serentak Tahun 2024, sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan bagi penyelenggara Pemilukada dan Optimaslisasi PAD kepada Kabupaten/Kota serta adanya laporan kegiatan.
41. Rapat terkait pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) Kabupaten Kupang dengan capaian kinerja output terinformasinya persoalan yang dihadapi oleh Kabupaten Kupang dan solusi yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan merekapitulasi seluruh sumber pendanaan untuk pajak yang harus dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Kupang dan syarat pencairan pendanaan dilakukan apabila telah disampaikan bukti setoran kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
42. Rapat terkait Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 bersama pejabat dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT dengan capaian kinerja output penyamaan persepsi terkait

program/kegiatan prioritas nasional dan daerah yang menjadi *input* dalam pelaksanaan evaluasi Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Adapun program/kegiatan yang menjadi prioritas yakni: Pendanaan Pemilukada, stunting, TJPS dan kemiskinan ekstrem.

43. Rekapitulasi temuan dan rekomendasi BPK atas LKPD Kab/Kota Tahun Anggaran 2022 dengan capaian kinerja output 1 (satu) dokumen berupa temuan dan rekomendasi BPK atas LKPD Kab/Kota Tahun Anggaran 2022 sesuai kebutuhan untuk FGD maupun informasi lain yang dibutuhkan.
44. Laporan Konsolidasi Realisasi Pemanfaatan DBH-CHT Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Semester 1 Tahun Anggaran 2023 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI Cq. Dirjen Perimbangan Keuangan RI dengan capaian kinerja output terinformasinya 1 (satu) Laporan Konsolidasi Realisasi Pemanfaatan DBH-CHT Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Semester 1 Tahun Anggaran 2023 kepada Menteri Keuangan RI Cq. Dirjen Perimbangan Keuangan RI.
45. Rekapitulasi Barang Inventaris di Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja output tersedianya 1 (satu) dokumen Barang Inventaris di Bidang Pembinaan Keuangan Kab/Kota.
46. Rapat konsultasi dari Kabupaten Kupang terkait Pendanaan Pemilukada Serentak Tahun Anggaran 2024 dengan capaian kinerja output adanya persamaan persepsi terkait pendanaan Pemilukada Serentak Tahun Anggaran 2024 yakni:
  1. Standar honor, Tunjangan Kecelakaan Kerja dan Tunjangan Kematian KPU dan BAWASLU ditentukan sesuai SK Gubernur NTT, Pendanaan TNI dan Polri disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan daerah dan Standar harga daerah masing-masing.
  2. Pencairan pendanaan melalui 2 (dua) tahap yakni: Pendanaan sekaligus Pendanaan secara bertahap tahap 1 (40%) dan tahap ke II (60%) sesuai Permendagri 54 Tahun 2019 dan Perubahannya

Permendagri 41 Tahun 2020 tentang Pendanaan Pemilu Kepala Daerah yang bersumber dari APBD.

47. Rapat International Standardization Organization (ISO) dengan capaian kinerja output penilaian dari Tim ISO antara lain: Komitmen untuk pelaksanaan ISO sangat baik, Operasional pelaksanaan sudah sesuai dengan SOP, Sistem manajemen mutu seperti rapat evaluasi triwulan, audit internal, laporan bulanan tetap dilaksanakan dengan baik.
48. Rapat Koordinasi bersama SKALA (Kemitraan antara Australia-Indonesia yang dikelola oleh Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan) dengan capaian kinerja output area focus yang menjadi bahan koordinasi yakni:
  1. Dukungan penguatan kapasitas dan tata cara pengalokasian anggaran daerah untuk penerapan layanan dasar yang inklusif dan berkualitas;
  2. Dukungan peningkatan penerapan SPM untuk memastikan dampak belanja terhadap ketersediaan layanan dasar yang inklusif dan berkualitas;
  3. Kajian terhadap potensi PAD dan sumber-sumber pembiayaan daerah.
49. Rapat Koordinasi tentang Pendanaan DAU Spesific Grand di Yogyakarta sesuai undangan Nomor: UND-211/PK.2/2023 Hal Kegiatan Rapid Assesment Kebijakan DAU yang ditentukan Penggunaannya dengan capaian kinerja output adanya informasi penting yang diterima dalam kaitan dengan Revisi PMK 212/PMK/2023 yang akan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan pada Tahun Anggaran 2024.
50. Rekapitulasi data Berita Acara Kesepakatan Penganggaran Pendanaan Pemilukada Serentak Tahun 2024 dengan capaian kinerja output adanya 1 (satu) Naskah Dinas terkait Berita Acara Kesepakatan Penganggaran Pendanaan Pemilukada Serentak Tahun 2024 dari 22 kab/kota.



51. Lokakarya Rencana Implementasi Bantuan Keuangan Provinsi NTT sekaligus Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2023 tentang pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja output terinformasinya Rencana Implementasi Bantuan Keuangan Provinsi NTT dan tersosialisasinya Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2023 tentang pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
52. Sosialisasi dan penegakan hukum cukai rokok ilegal di wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang dengan capaian kinerja output sosialisasi di wilayah Kota Kupang Jalan Hr Koroh Kelurahan Oepura dan Kelurahan Sikumana, di wilayah Airnona dan Bakunase. Di wilayah Kabupaten Kupang sosialisasi disepanjang Jalan Timor Raya dan Oesu'u Kecamatan Kupang Timur dan Amarasi di Desa Tablolong Kecamatan Kupang Barat serta dilakukan penindakan dengan penyitaan sejumlah rokok ilegal pada 2 (dua) wilayah tersebut yang termuat dalam 1 (satu) dokumen.
53. Rapat International Standardization Organization (ISO) dengan capaian kinerja output memperkenalkan sistem manajemen keamanan data pada instansi (SMKI). Manfaat utama ISO 27001 yakni untuk melindungi dan mempertahankan keamanan informasi yang terdiri dari aspek Confidentiality (Kerahasiaan), Integrity (Integritas) dan Availability (Ketersediaan).
54. Workshop integrasi pengelolaan keuangan berbasis elektronik (SAKTI) bagi Satker Pusat, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada hari Kamis, 7 September 2023 di The Jayakarta Suites Komodo Flores Labuan Bajo dengan capaian kinerja output adanya informasi yang diperoleh yakni:
  1. Reformulasi nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) TA 2023, Digipay yang merupakan sebuah platform yang mengintegrasikan sistem marketplace dengan sistem digital payment, dalam rangka penggunaan Uang Persediaan;



2. Mekanisme penatausahaan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI);
  3. Tips untuk mendapatkan nilai IKPA optimal.
55. Rapat monitoring penyelenggara SPM kab/kota terkait Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah (GWPP) yang dilaksanakan pada hari kamis, 21 September 2023 di hotel Sotis Kupang dengan capaian kinerja output penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian targetnya melalui mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yakni:
1. Pemda menuangkan target tahunan rencana pencapaian SPM dalam KUA PPAS, dan RKA SKPD sesuai klasifikasi belanja daerah dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
  2. Nota kesepakatan tentang KUA PPAS yang telah disepakati antar Kepala daerah dan DPRD wajib memuat pencapaian dan penerapan SPM;
  3. Penyusunan rencana pencapaian SPM dan anggaran kegiatan yang terkait dengan pencapaian SPM yang dilakukan.
56. FGD dengan Bank Indonesia terkait pencapaian realisasi anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sampai dengan 31 Agustus 2023 dengan capaian kinerja output terinformasinya data realisasi pendapatan belanja dan pembiayaan sampai dengan bulan Agustus 2023 untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur dan 22 Kabupaten/Kota.
57. Konsultasi teknis dari Pemerintah Kabupaten TTS terkait Pengelolaan keuangan daerah dengan capaian kinerja output terinformasinya pengelolaan keuangan daerah dan mekanisme penyusunan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang perubahan APBD.
58. FGD terkait mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah dengan capaian kinerja output mendapatkan informasi terkait tips mempertahankan opini BPK terhadap LKPD.
59. Rapat terkait draft Peraturan Gubernur tentang Inovasi Daerah dengan capaian kinerja output area focus yang menjadi bahan diskusi yakni:
1. Batang tubuh Pergub tentang Inovasi Daerah;

2. Substansi/ muatan materi terkait kelembagaan dan keuangan;
  3. Draft pergub inovasi daerah dicermati dari aspek hukum yakni konsideran dan tata bahasa hukum.
60. Laporan Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 dengan capaian kinerja output terinformasinya laporan Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan RI Provinsi NTT dan inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
61. Konsultasi secara virtual antara pemerintah kabupaten Manggarai Barat dengan Kemendagri terkait mekanisme penyusunan Perubahan APBD tahun 2023 dengan perubahan peraturan kepala daerah di fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi NTT dengan capaian kinerja output terinformasinya tahapan dan jadwal penyusunan Perubahan RAPBD dan mekanisme teknis penyusunan Perubahan RAPBD TA 2023 dan komponen yang termuat didalam Perubahan APBD, Likuiditas kas, serta penegasan dari kemendagri bahwa tidak adanya perubahan APBD dengan perda namun alokasi anggaran untuk pelayanan publik/ pelayanan dasar harus tetap diakomodir didalam perubahan APBD dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
62. Rapat dengan DJPK terkait senergi Bagan Akun Standar antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan capaian kinerja output adanya informasi dari DJPK terkait intervensi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah yang bersifat tematik dan spesifik untuk mencapai target tertentu.
63. Rapat Konsultasi dari DPRD Kabupaten TTS terkait persoalan keterlambatan persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Perubahan RAPBD Kabupaten TTS Tahun Anggaran 2023 dengan capaian kinerja output terinformasinya

komponen yang termuat didalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dialokasikan anggaran sesuai peraturan perundangan, yakni penambahan pada pendapatan transfer seperti dana insentif daerah dan dana desa. Selain itu, dialokasikan anggaran sesuai dengan specific grant, kegiatan prioritas seperti pemilukada dan kegiatan lainnya yang sudah dilaksanakan serta program kegiatan yang bersifat wajib, mengikat, darurat dan mendesak.

64. Rapat komite ALCo Regional Provinsi NTT periode realisasi sampai dengan 30 September 2023 dengan capaian kinerja ouput adanya informasi terkait pengelolaan asset dan kewajiban, ketersediaan kas. Selain itu Alco sebagai wadah yang mempunyai peranan terhadap kondisi makro ekonomi. pemerintah daerah diminta untuk dapat berinovasi dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah.
65. Kegiatan advokasi dan sosialisasi pembiayaan kesehatan dalam mendukung UHC dan kemitraan penanganan penyakit prioritas dengan capaian kinerja ouput terinformasinya materi terkait pemanfaatan dana cukai rokok untuk pembiayaan kesehatan di daerah kab/kota.
66. Rapat koordinasi secara virtual melalui aplikasi zoom meeting antara PJ. Gubernur NTT dan dan Para Bupati/Pj Bupati se- NTT terkait percepatan penandatanganan NPHD pendanaan kegiatan pemilukada tahun 2024 kepada Lembaga Penerima Hibah Daerah yakni KPU dan Bawaslu sesuai SE Mendagri Nomor 2 Tahun 2023 tentang percepatan penandatanganan NPHD pendanaan pemilukada Tahun 2024 dengan capaian kinerja ouput terinformasinya kesiapan kab/kota terkait percepatan penandatanganan NPHD pendanaan kegiatan pemilukada tahun 2024.
67. Pelaksanaan Penandatanganan NPHD Pendanaan Pemilukada bersama antara Kepala Daerah, KPU dan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja ouput tersedianya 23 (dua puluh tiga) dokumen NPHD pendanaan pemilukada yang telah di ditandatangani secara bersama oleh Kepala Daerah, KPU dan Bawaslu Provinsi dan 22 Kabupaten/Kota.

68. Laporan Penandatanganan NPHD antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Penyelenggara Pilkada Tahun 2024 Nomor 067/2404/BKUD5.2/2023 Tanggal 16 November 2023 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI C.q Dirjen bina Keuangan Daerah di Jakarta dengan capaian kinerja ouput terinformasi kesiapan dan kondisi yang terjadi dalam proses penandatanganan NPHD antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Penyelenggara Pilkada Tahun 2024.
69. Penyusunan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT Tahun Anggaran 2024 dengan capaian kinerja ouput adanya 1 (satu) Naskah Dinas terkait Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT Tahun Anggaran 2024 sebagai dasar bagi Kab/Kota untuk mempersiapkan alokasi anggaran pada RKP DBH-CHT 2024.
70. Sosialisasi terkait public internet oleh PT Moratelindo dengan capaian kinerja ouput adanya informasi terkait public internet yang merupakan cabang dari Singapura yang telah terkoneksi pada 5 negara dengan aliran jaringan data pada wilayah Jawa dan Bali dan telah terlisensi.
71. Rapat dengan Dinas Nakertrans Provinsi Jawa Barat dalam rangka menukar informasi terkait DBH-CHT dengan capaian kinerja ouput adanya 1 (satu) dokumen pemaparan materi dan diskusi terkait DBH-CHT sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
72. Rekapitulasi data statistik Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 dan Konsep Database Statistik Keuangan Daerah TA. 2022 dengan capaian kinerja output tersedianya 1 (satu) dokumen data statistik Kabupaten/Kota tahun 2022.

**c. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**

Kegiatan ini ditangani oleh Bidang Perbendaharaan dengan Pagu sebesar Rp. 1.907.327.688,- Realisasi Rp. 1.882.523.498,- (98,70%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan dijelaskan dalam tabel berikut ini:

1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas
  2. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
  3. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
  4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak ketiga (PFK)
  5. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas.
- ⇒ Pada Tahun Anggaran 2023 bidang Perbendaharaan telah melaksanakan kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
1. Membuat Buku Anggaran Kas dan SPD untuk Perda APBD dan Perubahan Perda APBD sebanyak 2 Buku untuk 33 SKPD yang terdiri dari : Perda APBD, dan Perubahan Perda.
  2. Pembuatan Data Master SPT Formulir 1721-A2 Perorangan untuk PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Masa Pajak 2022 , Pencetakan SPT Formulis 1721-A2 sebanyak 15.570 Orang
  3. Menerbitkan SP2D sebanyak 4.891 Dokumen SP2D Belanja Daerah
  4. Membuat Keputusan Gubernur Tentang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 dengan nomor : 900/54/BKUD3/2023 Tanggal 03 Februari 2023
  5. Membuat Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Besaran Honorarium Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 dengan nomor 900/55/BKUD3/2023 Tanggal 03 Februari 2023

6. Melakukan Rekapitulasi LHP BPK RI dan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Januari sampai Desember 2023 dengan keadaan terakhir Desember 2023 terdapat 29 Kasus LHP BPK dan 750 Kasus LHP Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
7. Membuat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 10 A/KEP/HK/ 2023 Tanggal 03 Januari 2023 Tentang Besaran Uang Persediaan (UP) Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023
8. Memverifikasi dan Menginput KP4 PNS sebanyak 13.427 Orang .
9. Hasil temuan rekonsiliasi data KP4 Kelebihan Tunjangan Keluarga PNS Pada Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur sejumlah Rp. 639.288.548,- belum termasuk guru-guru Kabupaten/Kota
10. Hasil rekonsiliasai KP4 guru-guru di Kabupaten/Kota terdapat kelebihan pembayaran Tunjangan Keluarga baik suami/istri,anak. Bidang Perbendaharaan turun ke Kabupaten/Kota untuk bertemu guru-guru yang terdapat temuan agar bisa setor kembali dengan membuat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Kuasa Untuk Melakukan Pemotongan Gaji dan atau Penghasilan lainnya jika guru yang terdapat temuan belum bisa setor sekaligus.
11. Membuat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 345/KEP/HK/2023 Tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Akhir Tahun 2023 Tanggal 31 Oktober 2023.
12. Membuat keputusan Gubernur Tentang: Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor : 900/388/BKUD3/2022 Tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 dengan nomor 900/52/BKUD3.3/2023 Tanggal 2 Februari 2023
13. Membuat Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga

Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tanggal 04 April 2023.

14. Membuat Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tentang : Penetapan Nomor Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Pejabat Pengelola Dan Rekening Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 dengan nomor 900/53/BKUD3.3/2023 Tanggal 3 Februari 2023.
15. Membuat Surat Keputusan Gubernur Tentang Penunjukan Bendahara dan Nomor Rekening Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023 Tanggal 13 Februari 2023
16. Membuat Surat Keputusan Gubernur Tentang : Pejabat Pengelola Dana Dekonsentrasi dan tugas Perbantuan Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 Nomor 900/66/BKUD3/2023 Tanggal 14 Februari 2023
17. Membuat Surat Keputusan Gubernur tentang : Perubahan Kelima Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/388/BKUD3/2023 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi NTT TA 2023 nomor 900/84/BKUD3/2023 Tanggal 05 April 2023
18. Membuat Surat Keputusan Gubernur tentang : Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/101/BKUD3/2023 tentang  
Pejabat Pengelola Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 Nomor 900/38/BKUD3/2023 Tanggal 05 April 2023
19. Membuat Surat Keputusan Gubernur tentang: Perubahan atas lampiran keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/100/BKUD3/2023 tentang penetapan Nomor Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Rekening



Badan layanan Umum Daerah (BLUD) Provinsi Nusa Tenggara Timur  
TA 2023 Nomor 900/53/BKUD3/2023 Tanggal 05 April 2023

20. Membuat Surat Keputusan Gubernur tentang : Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/1101/BKUD3/2023 tentang Pejabat Pengelola Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 Nomor 900/109/BKUD3/2023 Tanggal 23 Mei 2023
21. Membuat Surat Keputusan Gubernur tentang: Perubahan atas lampiran keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/1152/BKUD3/2023 tentang penetapan Pengelola Keuangan Dan Pelaksana Penata Utasahaan Keuangan Daerah TA 2023 Nomor 900/111/BKUD3/2023 Tanggal 29 Mei 2023
22. Membuat Surat Keputusan Gubernur tentang: Perubahan atas lampiran keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur: 900/1151/BKUD3/2023 tentang Tim Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Aplikasi Cash Managemen System di Lingkungan Pemerintah Prov. NTT TA 2023 nomor 900/110/BKUD3/2023 Tanggal 29 Mei 2023
23. Bidang Perbendaharaan sebagai narasumber dalam monitoring evaluasi DAK terkait mekanisme penyaluran dan pelaksanaan DAK fisik Tahun Anggaran 2023 agar terjadi sinkronisasi antara OPD, BAPEDA, Inspektorat dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur.
24. Membuat Surat Keputusan Gubernur tentang : Perubahan Kedelapan atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 900/126/BKUD3.3/2023 Tentang PPKD Pada OPD Prov. NTT T.A 2023 nomor 900/136/BKUD3/2023 Tanggal 03 Juli 2023
25. Membuat Surat Keputusan Gubernur tentang: Perubahan Keempat atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 900/109/BKUD3.3/2023 tentang Pejabat Pengelola Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Perangkat Daerah Prov. NTT T.A 2023 Nomor 900/148/BKUD3/20023 Tanggal 12 Juli 2023



26. Membuat Surat Keputusan Gubernur tentang : Perubahan Kesembilan atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 900/388/BKUD3.3/2022 Tentang PPKD Pada OPD Prov. NTT T.A 2023 Nomor 900/164/BKUD3/2023 Tanggal 10 Agustus 2023
27. Membuat surat Keputusan Gubernur tentang: Perubahan Kelima atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 900/38/BKUD3.3/2023 tentang Pejabat Pengelola Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Perangkat Daerah Prov. NTT T.A 2023 nomor 900/166/BKUD3/20023 Tanggal 11 Agustus 2023
28. Membuat Surat Keputusan Gubernur tentang: Perubahan Kesepuluh atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 900/388/BKUD3.3/2022 tentang PPKD pada OPD Prov NTT TA. 2023 Nomor 900/175/BKUD3/2023 Tanggal 22 Agustus 2023
29. Membuat Keputusan Gubernur Tentang : Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Akhir Tahun Anggaran 2023 Nomor 345/KEP/HK/2023 Tanggal 31 Oktober 2023
30. Membuat Surat Keputusan Gubernur Tentang: Perubahan Kesebelas atas lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 900/388/BKUD3.3/2022 tentang PPKD pada OPD Prov. NTT TA 2023 Nomor 900/223/BKUD3/2023 Tanggal 10 November 2023
31. Membuat Keputusan Gubernur Tentang: Perubahan Kedua Belas atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 900/388/BKUD3.3/2022 tentang PPKD pada OPD Prov. NTT TA. 2023 Tanggal 14 November 2023
32. Membuat Keputusan Gubernur tentang: Perubahan Keenam atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 900/38/BKUD3.3/2022 tentang Pejabat Pengelola Dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan Pada OPD Prov. NTT TA. 2023 Nomor 900/223/BKUD3/2023 Tanggal 10 November 2023
33. Membuat Surat Keputusan Gubernur tentang: Perubahan Ketujuh atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 900/38/BKUD3.3/2022 tentang Pejabat Pejabat Pengelola Dana

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada OPD Prov. NTT T.A 2023  
Nomor 900/225/BKUD3/2023 Tanggal 14 November 2023.

**Tabel. 3.6**  
**Hasil Pelaksanaan Bidang Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**  
**per 31 Desember 2023**

PROGRAM	KEGIATAN	BENTUK/WUJUD	REALISASI			K E T
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan	Pengelolaan Kas Daerah	Menerima, memverifikasi dan memproses SPP/SPM dari Perangkat Daerah (PD) Lingkup Pemprov. NTT dan selanjutnya diproses menjadi SP2D.	Belanja Daerah	4.891	Doc	
			Terdiri Dari :			
			UP	33	Doc	
			GU	411	Doc	
			TU	16	Doc	
			LS Gaji Induk	718	Doc	
			LS Gaji Susulan	62	Doc	
			LS Kekurangan Gaji	53	Doc	
			LS Gaji Terusan	153	Doc	
			LS Selisih Harga Beras	33	Doc	
			LS Gaji PPPK	541	Doc	
			LS Susulan Gaji PPPK	2	Doc	
			LS Gaji Ke-13 PPPK	48	Doc	
			LS Susulan Gaji Ke-13	2	Doc	
			LS THR PPPK	47	Doc	
			LS THR	64	Doc	
			LS Terusan THR	13	Doc	
			LS Terusan Gaji 13	11	Doc	
			LS Gaji Ke-13	59	Doc	
			LS TPP	663	Doc	
			LS Susulan TPP	10	Doc	

			LS Kekurangan TPP	1	Doc	
			LS TPP Purna Bhakti	83	Doc	
			LS TPP PPPK	32	Doc	
			LS TPP PNS Meninggal	1	Doc	
			LS Honorer	594	Doc	
			LS Susulan Honorer	2	Doc	
			LS Susulan Guru Ktrk	1	Doc	
			LS DPRD	60	Doc	
			LS Tj. Prof Guru	20	Doc	
			LS Tj. Prof Guru PPPK	4	Doc	
			LS Tj. Khusus Guru	7	Doc	
			LS Tj. Tamsil Guru PPPK	4	Doc	
			LS. Tj. Khusus Guru PPPk	1	Doc	
			LS. Tj, Tamsil Guru	4	Doc	
			LS Barang dan Jasa	907	Doc	
			LS Operasional	32	Doc	
			LS Insentif	19	Doc	
			LS Honorarium	66	Doc	
			LS Iuran BPJS Kesehatan	83	Doc	
			LS Susulan BPJS Kesehatan	1	Doc	
			LS Hibah	81	Doc	
			LS Bansos	21	Doc	
			LS Modal	522	Doc	
			LS PPKD	41	Doc	
			LS Bagi Hasil	17	Doc	

			LS Tidak Terduga      10      Doc LS Dana Cadangan      12      Doc LS Pinjaman              2      Doc Daerah	
		Membuat SKPP (Pensiun BUP, Pensiun Dini, Janda Duda dan Pindah)	SKPP Pindah      :   19 K  SKPP BUP        : 463 SK  SKPP               : 49 SK Meninggal  SKPP Diberhentikan    : 4 SK  SKPP Pensiun    : 1   SK Dini Jumlah             : 536	
		Menginput Perubahan Gaji Pada Aplikasi Gaji SIM Taspen	Perubahaan Gaji Berkala/Naik pangkat PNS : 5.496 Orang Guru : 6.518 Orang PPPK Tahap 1 : 78 Orang PPPK Tahap 2 : 878 Orang	
		Memverifikasi dan Menginput KP4 PNS	13.427 Orang	
		Mengumpulkan, Membuat Rekapan dan Memverifikasi Data Master SPT Formulir 1721-A2 Perorangan untuk PNS	Pencetakan SPT Formulir 1721-A2 Perorangan untuk PNS Aktif dan Pensiun Lingkup Pemprov. NTT untuk Masa Pajak 2022 sebanyak 15.570 orang	

		Lingkup Pemerintah Prov. NTT Masa Pajak 2022		
		Melakukan Pengiriman Laporan Realisasi Tahunan (LRT) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2022	SuratPengantar 067/177/BKUD3.3/2023 Tanggal 24 Januari 2023	:
		Membuat Laporan Bulanan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Penyaluran Dana DAU, tentang : - Data Belanja Gaji Pegawai dan TPP Tahun Anggaran 2023 untuk Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) - Data Belanja Gaji PPPK dan TPP Tahun Anggaran 2023 untuk Perhitungan	Dari Bulan Januari Sampai Desember 2023	

		Dana Alokasi Umum (DAU)  Ke Menteri Keuangan Republik Indonesia  c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)		
		Pembayaran Gaji Bulanan bagi PNS Lingkup Pemprov. NTT TA. 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verifikasi berkas</li><li>- Penginputan Perubahan Pegawai Pada Aplikasi SIM Gaji Taspen</li><li>- Pencetakan Daftar Gaji</li><li>- Pencetakan SP2D</li><li>- Realisasi Pembayaran</li></ul>	
		Mengentri Buku Bantu Rekening Kas Daerah Provinsi Januari – Desember 2023	<div>Penerimaan68.260Doc</div> <div>Pengeluaran4.891Doc</div>	
		Menginput Data Bukti Setoran dan SP2D dalam Buku Kas Umum Daerah Januari- Desember 23	<div>Penerimaan68.260Doc</div> <div>Penngeluaran4.891Doc</div>	
		Membuat Rekapitulasi Penerimaan dan pengeluaran PFK (Perhitungan Fihak Ketiga),	PNS pada 33 OPD dan 1 Anggota Dewan, Lingkup Pemprov. NTT,OPD  Pengalihan 3 Kab/Kota dan Guru SMA/SMK Pengalihan 22 Kab/Kota	

		yang terdiri dari beras, Taspen, Iuran Kesehatan, Iuran Ketenaga kerjaan, PPh Ps. 21, Taperum, PPN dan PPh Ps. 22		
		Membuat rekapitulasi pemotongan dan penyetoran terhadap kredit Kendaraan Roda 2 dan 4 ke kas daerah	Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember	Jumlah OPD 17 17 17 17 17 16 16 16 16 16 16 16 16 Bukti
		Melakukan verifikasi keabsahan dokumen terhadap SP2D yang akan dilakukan pencairan		4.891 Doc
		Membuat Laporan dan Melakukan pengiriman Daftar Transaksi Harian (DTH)	Januari – November 2023	

		dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Tahun 2023 ke KPP Pratama Kupang		
		Melakukan Konfirmasi Dana Pusat melalui Lembar Konfirmasi Transfer (LKT) Tahun 2023 ke : 1. Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah Jakarta  2. Kepala KPPN Cabang Kupang	Januari - November 2023	
		Melakukan Pengiriman Daftar Rekapitulasi, Bukti Billing: Iuran Wajib Pegawai dan Bukti Billing Iuran Asuransi Kesehatan Tahun 2023	Januari - Desember 2023	
		Melakukan pengiriman bukti	<div>Bulan</div> <div>Januari</div> <div>Jumlh</div> <div>Setorn</div> <div>34</div> <div>PT.</div>	



		pembayaran beras Tahun 2023	Februari	34	Flobamor PT.	
			Maret	34	Flobamor PT.	
			April	33	Flobamor Bulog	
			Mei	33	Bulog	
			Juni	33	Bulog	
			Juli	33	Bulog	
			Agustus	33	Bulog	
			September	33	Bulog	
			Oktober	33	Bulog	
			November	33	Bulog	
			Desember	33	Bulog	
		Rekapitulasi LHP BPK RI dan Inspektorat Daerah Prov. NTT Keadaan Desember 2023	LHP BPK RI (29 kasus) Nominal Rp. 152.115.137,- LHP Inspektorat Daerah Prov. NTT ( 750 kasus) Nominal Rp. 7.922.238.787,-			

**a. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**

Selama Tahun 2023, hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT yang menjadi tanggungjawab teknis dari Bidang Akuntansi dan Pelaporan berdasarkan DPPA Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT TA. 2023 dengan Pagu sebesar Rp. 2.652.178.702,- Realisasi Rp2.581.978.397,- (97,35%), dapat dijelaskan sebagai berikut :

Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang terdiri dari sub-sub kegiatan antara lain:

- Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 95.680.000 dan sampai Dengan tanggal 31 Desember realisasi sebesar Rp.95.676.000,- atau (99,99%) Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :
  - ⇒ Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Bulanan Desember 2023
  - ⇒ Tersusunnya Laporan Realisasi (LRA) Bulan Desember 2023
- Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 484.776.602,- dan sampai dengan 31 Desember 2023 realisasi Sebesar Rp. 467.960.920,- Atau (96,53%) Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :
  - ⇒ Tersusunnya Laporan Keuangan (Unaudited) SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT TA 2023;
  - ⇒ Berkoordinasi dengan Tim pemeriksa BPK RI perwakilan Provinsi NTT terkait Pemeriksaan pendahuluan terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023;
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT,dianggarkan sebesar Rp. 2.071.722.100,-dan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.2.018.341.477,- atau 997,42%.  
Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :
  - ⇒ Tersusunnya Ranpergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT TA 2023
  - ⇒ Tersusunnya Ranperda tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT TA 2023

**Tabel. 3.7**  
**Hasil Pelaksanaan Bidang Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**  
**Per 31 Desember 2023**

<b>Program</b>	<b>Rincina Kegiatan</b>	<b>Target (dokumen/ kegiatan)</b>	<b>Realisasi (dokumen/ kegiatan)</b>	<b>Ket</b>
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Akuntansi & Pelaporan Keuangan Daerah	1. Sub kegiatan Koordinasi pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	3 Dokumen	3 Dokumen	
	2. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	3 Dokumen	3 Dokumen	
	3. Koordinasi dan penyusunan Ranperda dan Ranpergub tentang Pert. Pelaksanaan APBD Prov.NTT	2 dokumen	2 dokumen	

**b. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Kegiatan ini ditangani oleh Bidang Anggaran dan Bidang Akuntansi Pelaporan, terdiri dari Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah dan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dan Pengelolaan

Dana Darurat dan Mendesak dengan Pagu sebesar Rp. 729.392.501.265,-  
Realisasi Rp. 656.214.779.242,- (89,97%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan:  
⇒ Terkelolahnya dana darurat mendesak

## **F. Permasalahan Dan Solusi**

### **1. Sekretariat**

#### **a. Permasalahan**

- 1) Sebagian besar (bidang/sub bidang/sekretariat/sub bagian) belum menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tepat waktu.
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang kinerja pada Sekretariat seperti :
  - ⇒ Ruang kerja yang tenang dan nyaman
  - ⇒ Aplikasi yang menunjang sistem pelaporan dan pengarsipan berbasis digitalisasi
  - ⇒ Fasilitas penyimpanan arsip yang baik
  - ⇒ Kurangnya kapasitas internet yang memadai
  - ⇒ Ruangan yang panas menjadi tidak nyaman dalam bekerja
  - ⇒ Kurangnya bimtek atau diklat karena kurangnya ketersediaan dana

#### **b. Solusi**

- 1) Masing-masing bidang/sub bidang/sub bagian segera menyampaikan Laporan Bulanan paling lambat setiap tanggal 05 dalam bulanan.
- 2) Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana pada Sekretariat sesuai dengan permasalahan diatas.
- 3) Kapasitas internet di naikan
- 4) Melakukan koordinasi dengan Biro umum atau pihak terkait
- 5) Ditambah dana untuk bimtek dan diklat untuk seluruh pegawai

## 2. Bidang Anggaran

### a. Permasalahan

1. Permasalahan yang Dihadapi terkait Penyesuaian Rincian Sub Kegiatan Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan Bidang Pekerjaan Umum Sesuai Amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 212/PMK.07/2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya TA. 2023.
2. Pelaksanaan Survey Harga Barang dan Jasa di 21 Kabupaten/Kota Mengalami Kendala Dalam Mendapatkan Data Survey Standar Harga Dilapangan Dengan Harus Melampirkan Minimal 3 (Tiga) Referensi Harga.
3. Proses verifikasi dokumen pengajuan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai bulan januari 2023 pada beberapa Perangkat Daerah tidak dapat divalidasi karena hasil Verifikasi oleh tim TPP tidak segera diperbaiki oleh Perangkat Daerah;
4. Hasil Evaluasi Survey Standar Harga masing-masing terdapat beberapa kekurangan data sehingga tim mengalami kesulitan dalam menganalisa data yang ada.
5. Terdapat Kendala Dalam Persiapan Penyusunan Laporan Realisasi Penyerapan Tahap I Sesuai Nomor 212/PMK.07/2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang di Tentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023.
6. Dalam dokumen perencanaan-RKPD Tahun Anggaran 2024 dan Dokumen Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2023 tidak Terdapat Beberapa Kegiatan yang Penting atau Kegiatan Rutin SKPD
7. Terdapat beberapa Catatan/Kritik/Saran dan Pertanyaan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi NTT dalam Rapat Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penyusunan RAPBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024 Maupun Dalam Rangka Harmonisasi Pemerintah Daerah Terhadap SK

Mendagri tentang Evaluasi Rancangan Perubahan APBD Provinsi NTT Tahun 2023.

8. Terhadap Hasil Evaluasi Pembayaran TPP Semester I Tahun 2023 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2023 Tentang TPP bagi Pegawai ASN di Lingkup Pemerintahan Provinsi NTT Menggunakan Presentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun Sebelumnya Sedangkan Presentase Dimaksud Belum Dilakukan Penilaian, Sehingga Pembayaran TPP Semester I Menggunakan Presentase Rata-Rata Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Semester II Tahun Sebelumnya.
9. Proses Verifikasi Dokumen Pengajuan Pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai 2023 pada Beberapa Perangkat Daerah Tidak Dapat Divalidasi Karena Hasil Verifikasi Oleh Tim TPP Tidak Segera Diperbaiki Oleh Perangkat Daerah.

**b. Solusi**

1. Terhadap Permasalahan yang dihadapi ditindaklanjuti dengan melakukan rapat dan koordinasi dengan Perangkat Daerah secara rutin sehingga dilakukan penyesuaian/pergeseran pada Peraturan Gubernur NTT guna percepatan pelaksanaan APBD TA. 2023.
2. Terhadap kekurangan data Standar Harga sesuai Hasil Evaluasi maka dilakukan survey Standar Harga tahap II.
3. Secara Rutin Melakukan Koordinasi dan Rapat Tim Dengan Perangkat Daerah yang Mendapat Alokasi Dana Alokasi Umum Spesific Grant Yakni Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan Bidang Pekerjaan Umum Agar Dapat Menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan Tahap I Sesuai Jadwal yang Telah Ditentukan.
4. Terhadap sejumlah kegiatan penting atau kegiatan rutin SKPD yang tidak terdapat dalam dokumen perencanaan/RKPD diakomodir dalam Dokumen KUA PPAS Tahun Anggaran 2024 dan Dokumen Perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2023 melalui Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Gubernur NTT dan DPRD Provinsi NTT.

5. Melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintahan Provinsi NTT maupun dengan Stake Holder terkait untuk dapat menjawab catatan/kritik/saran maupun pertannyaan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi NTT.
6. Sesuai kesepakatan rapat Tim TPP, akan Melakukan Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2023 Tentang TPP bagi Pegawai ASN di Lingkup Pemerintahan Provinsi NTT agar pembayaran TPP semester I dan semester II Tahun 2023 menggunakan Presentase Rata-Rata Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah semester II tahun sebelumnya.
7. Tim TPP Terus Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah untuk segera menindaklanjuti hasil verifikasi Tim TPP agar pelaksanaan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai dapat terealisasi.

### **3. Bidang Perbendaharaan**

#### **a. Permasalahan**

- 1) OPD tidak tepat waktu menyampaikan SPP/SPM menjelang akhir tahun.
- 2) Penggunaan Aplikasi Cash Management System (CMS) Pada Organisasi Perangkat Daerah Belum Maksimal.
- 3) OPD terlambat mengajukan SPP/SPM LS Barang dan Jasa di akhir tahun.
- 4) Terdapat kelebihan Pembayaran Tunjangan Keluarga
- 5) Kurangnya Sarana dan Prasarana berupa Komputer dan Printer
- 6) Kurangnya Tenaga PNS.

#### **b. Solusi**

- 1) Pada awal Tahun Anggaran 2024 seluruh OPD sudah bisa menggunakan Aplikasi Cash Management System (CMS).
- 2) Menjadi catatan agar tidak terjadi lagi di tahun anggaran berikutnya.
- 3) Menjadi catatan dan tidak terjadi lagi pada tahun anggaran berikutnya

- 4) Pada Tahun Anggaran 2024 untuk segera tambahkan Komputer dan printer
- 5) Dapat ditambahkan tenaga PNS untuk Bidang Perbendaharaan

#### **4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan**

##### **a. Permasalahan**

- 1) Berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang akuntansi dan pelaporan, disampaikan terkait realisasi penyerapan anggaran per 31 Desember 2023 untuk bidang akuntansi dan pelaporan tidak terdapat masalah/hambatan, rata-rata realisasi anggaran sudah di atas sembilan puluh lima persen dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai skedul dan waktu pelaksanaan kegiatan.

#### **5. Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota**

##### **a. Permasalahan**

1. Belum tepat waktu kabupaten/kota menyampaikan laporan realisasi anggaran (LRA) setiap bulan.
2. Kesiapan aplikasi Sistem informasi pemerintahan daerah SIPD terkait penatausahaan dan pelaporan belum dapat dilaksanakan secara baik pada hampir semua daerah.
3. Belum tepat waktu penyampaian data dan dokumen yang disampaikan oleh Kabupaten/Kota yakni:
  - a. Data Penyertaan Modal penganggaran dan realisasi Penyertaan Modal Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 dan data penganggaran Penyertaan Modal Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 pada Bank NTT dan BUMD lainnya belum disampaikan secara lengkap;
  - b. Data penganggaran Dana Cadangan dalam rangka Pemilukada Serentak Tahun 2024 bagi kab/kota yang menganggarkan dana cadangan belum disampaikan secara lengkap;
  - c. Data Penganggaran pendanaan bersama pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2023 dan 2024 yang masih terkendala



- karena beberapa daerah belum ada kesepakatan terkait rekening bank penampung dana Pilkada;
- d. Dokumen Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam bentuk soft copy dan hard copy belum disampaikan secara lengkap;
  - e. Dokumen Perda Pengelolaan Keuangan Daerah dan 4 (empat) Peraturan Kepala Daerah tentang sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Akuntansi Daerah, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Analisis Standar Belanja belum disampaikan secara lengkap;
  - f. Dokumen hasil penyesuaian RKP DBH-CHT 22 kabupaten/kota setelah dilaksanakan rekonsiliasi RKP DBH-CHT Tahun Anggaran 2023 yang belum tepat penyampaian laporannya.
4. Belum responsifnya kab/kota dalam menyampaikan *feed back* terhadap hasil evaluasi RAPBD TA 2023 hanya beberapa kabupaten yang menyampaikan catatan atas hasil evaluasi RAPBD kab/kota.
  5. Tidak semua catatan evaluasi Gubernur atas RAPBD Kabupaten/Kota TA. 2023 ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
  6. Masih rendahnya penyerapan anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 diakibatkan oleh keterbatasan anggaran.
  7. Sistem digitalisasi terkait pengelolaan keuangan daerah di kabupaten/kota yang belum optimal.
  8. Beberapa Kabupaten/Kota baik itu KPU dan BAWASLU belum menyepakti penyimpanan dana pilkada kedalam rekening bank NTT.
  9. Pemerintah daerah kabupaten/kota kurang memahami terkait penyusunan RKP DBH-CHT dan surat pengalihan DBH-CHT. Adapun beberapa persoalan terkait DBH-CHT sbb:
    - a. Belum memahami pengisian data pada format RKP dan surat pengalihan sesuai dengan pada PMK 215 Tahun 2021;

- b. Masih belum memahami secara baik memperhitungkan prosentase pada masing-masing bidang;
  - c. Beberapa kabupaten Belum terkoordinasi kegiatan bidang penegakan hukum secara baik dengan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang, Manggarai Barat dan Belu sehingga kegiatan seperti penegakkan hukum belum terlaksana secara baik.
10. Pada FGD BLUD yang menjadi permasalahan pokok dalam pengelolaan keuangan BLUD di Kab/Kota yakni:
- a. Belum adanya kesamaan pemahaman tentang kedudukan, tugas dan fungsi BLUD, khususnya pada aspek pengelolaan pendapatan dan belanja termasuk oleh legislatif;
  - b. Distribusi dan rekrutmen SDM belum mengedepankan aspek fleksibilitas dengan mempertimbangkan kajian kebutuhan BLUD;
  - c. Belum maksimalnya peran bagian ekonomi sebagai Pembina BLUD sesuai amanat Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan kabupaten/Kota;
  - d. Belum maksimalnya peran instansi Pembina Teknis dalam mendukung Pengelolaan BLUD;
  - e. Penentuan komposisi dewan pegawai dengan mempertimbangkan kebijakan kepala Daerah dan tidak memperhatikan arahan regulasi Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang BLUD.
11. Berdasarkan pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah masih terdapat temuan berulang.
12. Masih terdapat kabupaten yang tidak menaati tahapan dan jadwal persetujuan Bersama antara Kepala Daerah dan DPRD pada Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2023 yakni Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten TTS.

## b. Solusi

1. Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar menyampaikan data LRA, data Penyertaan Modal, Dokumen Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Dokumen Perda Pengelolaan Keuangan Daerah dan 4 (empat) Peraturan Kepala Daerah tentang system dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Akuntansi Daerah, System Akuntansi Pemerintah Daerah dan Analisis Standar Belanja. data RKP DBH-CHT dan laporan realisasi DBH-CHT dan serta data lainnya agar menyampaikan tepat waktu setiap bulan, triwulan semesteran dan tahunan sesuai jadwal yang ditentukan melalui grup whats APP maupun dihubungi secara langsung.
2. Koordinasi, konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan kabupaten/kota tetap dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTT guna penyiapan secara baik SIPD RI terkait pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban.
3. Menjadi catatan untuk diperhatikan pada tahun anggaran berikutnya.
4. Menjadi bahan pembinaan dalam penganggaran pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota.
5. Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dan konsolidasi yang insentif dengan Pemerintah dan stakeholders dalam rangka meningkatkan sistem digitalisasi pengelolaan keuangan daerah karena dengan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), pengelolaan keuangan daerah diyakini akan lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

6. Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman ASN pengelola DBH-CHT di Kabupaten/Kota dapat menjawab permasalahan pokok pengelolaan dan Pemanfaatan DBH-CHT:
  - a. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola dan pemanfaatan DBH-CHT melalui FGD, bimtek, Diklat rapat koordinasi dll;
  - b. Penguatan peran dan komitmen pemerintah daerah dalam penyelenggaraan dan pengelolaan DBH-CHT melalui konsistensi terhadap penempatan ASN pengelola DBH-CHT;
  - c. Membangun pola koordinasi secara insentif serta kooperatif dengan Pemerintah Pusat, Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang, Manggarai Barat dan Pemerintah Provinsi NTT.
7. Dengan pelaksanaan FGD pengelolaan keuangan BLUD maka pemahaman ASN pengelola keuangan BLUD di Kabupaten/Kota dapat menjawab permasalahan pokok pengelolaan keuangan BLUD yakni:
  - a. Penguatan peran dan komitmen pemerintah daerah dalam penyelenggaraan dan pengelolaan BLUD sebagai tujuan pelayanan kepada masyarakat melalui rapat koordinasi dan sosialisasi terkait BLUD bersama OPD yang berhubungan langsung dengan BLUD dan pihak legislatif (komisi yang membidangi) dalam rangka mendapatkan pengetahuan dan kesepahaman yang sama tentang BLUD dan pengelolaan BLUD;
  - b. Mengupayakan dan mendorong terwujudnya perjanjian kerjasama antara BLUD dengan mitra dalam rangka mendukung peningkatan pendapatan BLUD;
  - c. Berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah agar dalam penempatan SDM pengelola BLUD mengedepankan kebutuhan dan profesionalisme;
  - d. mengupayakan dan mendorong pelaksanaan azas fleksibilitas BLUD dapat dijalankan secara proporsional dengan merujuk pada regulasi melalui peningkatan peran bagian ekonomi sebagai Pembina BLUD;

- e. mendorong mekanisme perencanaan dan penganggaran dalam instansi teknis agar mengakomodir proses dan tahapan perencanaan dan penganggaran BLUD;
  - f. Secara berkelanjutan memberikan penguatan fungsi BLUD baik melalui dukungan APBD maupun dukungan kebijakan lainnya dalam rangka optimalisasi kinerja BLUD.
8. Melakukan pembinaan dan pendampingan/coaching clinic kepada kabupaten/kota melalui bimtek, workshop tentang pengelolaan keuangan daerah sesuai kondisi dan ketersediaan anggaran.
  9. Perlu adanya koordinasi yang intensif antara Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kab/Kota dan DPRD Kab/Kota terkait perhitungan kemampuan keuangan daerah, bagi hasil pajak, dll.
  10. Pemerintah Provinsi NTT akan tetap melaksanakan fungsi koordinasi dan konsultatif yang intensif dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota terkait penyusunan RAPBD induk, perubahan dan pertanggungjawaban sesuai tahapan dan jadwal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
  11. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menyampaikan surat Gubernur Nusa Tenggara Timur terhadap Kabupaten Kabupaten TTS dan Kabupaten Manggarai Barat dengan masing-masing surat Nomor: 913/2056/BKUD5.2/2023 Tanggal 4 Oktober 2023 Hal Perubahan APBD Kabupaten TTS Tahun Anggaran 2023 yang ditujukan kepada Bupati TTS dan Surat Nomor Nomor: 067/2237/BKUD5.I/2023 Tanggal 26 Oktober 2023 Hal penjelasan terkait permohonan evaluasi Rancangan Perubahan APBD Kab Manggarai Barat Tahun Anggaran 2023 yang ditujukan kepada Bupati Manggarai Barat.

#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

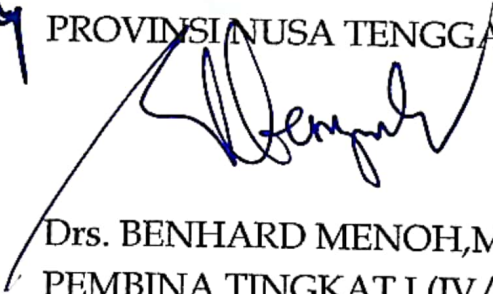
Laporan Tahunan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2023 disusun sebagai bentuk penyediaan informasi dan pertanggungjawaban penyelenggaraan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023.

Keberhasilan yang dicapai adalah berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang, Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT dapat terus meningkatkan kinerjanya.

Kupang, Januari 2024

Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

9

  
Drs. BENHARD MENOHI, MT  
PEMBINA TINGKAT I (IV/B)  
NIP. 19720512 199101 1 001